

**PARTISIPASI MASYARAKAT PESISIR DALAM MELESTARIKAN
HUTAN MANGROVE DI DESA PURWOREJO
KECAMATAN PASIR SAKTI KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR**

(Tesis)

Oleh

**M. RIZKI AL SAFAR
NPM 2020021003**



**PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU PENYULUHAN PEMBANGUNAN/
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRACT

PARTICIPATION OF COASTAL COMMUNITIES IN PRESERVING MANGROVE FORESTS IN PURWOREJO VILLAGE, PASIR SAKTI DISTRICT, EAST LAMPUNG REGENCY

BY

M. RIZKI AL SAFAR

The purpose of the research is to analyze the level of community participation in activities to conserve mangrove forests, factors related to community participation in preserving mangrove forests, determine the relationship between participation and the contribution of community income to mangrove forest conservation, and determine the level of community income in preserving mangrove forests in Purworejo Village, District. Pasir Sakti, East Lampung Regency. The research method used was a survey method, the data collected was tabulated based on each category and analyzed descriptively and the Spearman Rank test was carried out. The conclusion is that the factors related to community participation in preserving mangrove forests in Purworejo Village, Pasir Sakti District, East Lampung Regency are level of non-formal education, type of work, number of family dependents, length of residence, distance from house to mangrove location, role of community leaders, the role of farmer groups, government support, and the role of non-government organizations, while unrelated factors are age and education level. Participation has a real positive relationship to the contribution of community income to mangrove forest preservation in Purworejo Village, Pasir Sakti District, East Lampung Regency. Community participation in providing family income for mangrove forest conservation contributed to the highest average income of IDR 1,284,677 per month.

Keywords: Participation, Preservation, Mangrove Forest, Income.

ABSTRAK

PARTISIPASI MASYARAKAT PESISIR DALAM MELESTARIKAN HUTAN MANGROVE DI DESA PURWOREJO KECAMATAN PASIR SAKTI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

OLEH

M. RIZKI AL SAFAR

Tujuan dari penelitian untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan melestarikan hutan mangrove, faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam melestarikan hutan mangrove, mengetahui hubungan partisipasi terhadap kontribusi pendapatan masyarakat pada pelestarian hutan mangrove, dan mengetahui tingkat pendapatan Masyarakat pada pelestarian hutan mangrove di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey, data yang terkumpul ditabulasi berdasarkan kategori masing-masing dan dianalisis secara deskriptif dan dilakukan uji *Rank Spearman*. Kesimpulannya adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam melestarikan hutan mangrove di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur adalah tingkat pendidikan non-formal, jenis pekerjaan, jumlah tanggungan keluarga, lama bertempat tinggal, jarak rumah dengan lokasi mangrove, peran tokoh masyarakat, peran kelompok tani, dukungan pemerintah, dan peran *non government organization*, sedangkan faktor-faktor yang tidak berhubungan adalah umur dan tingkat pendidikan. Partisipasi memiliki hubungan nyata kearah positif terhadap kontribusi pendapatan masyarakat pada pelestarian hutan mangrove di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur. Partisipasi masyarakat dalam memberikan pendapatan keluarga pada pelestarian hutan mangrove menyumbang rata-rata pendapatan paling tinggi sebesar Rp1.284.677,- per bulan.

Kata kunci: Partisipasi; Pelestarian; Hutan Mangrove; Pendapatan.

**PARTISIPASI MASYARAKAT PESISIR DALAM MELESTARIKAN
HUTAN MANGROVE DI DESA PURWOREJO
KECAMATAN PASIR SAKTI KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR**

Oleh

M. RIZKI AL SAFAR

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINS**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan /
Pemberdayaan Masyarakat
Pascasarjana Multidisiplin Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PENYULUHAN
PEMBANGUNAN/PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Tesis : PARTISIPASI MASYARAKAT PESISIR DALAM MELESTARIKAN HUTAN MANGROVE DI DESA PURWOREJO KECAMATAN PASIR SAKTI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nama Mahasiswa : **M. Rizki Al Safar**

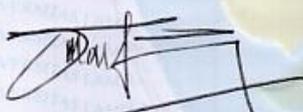
Nomor Pokok Mahasiswa : 2020021003

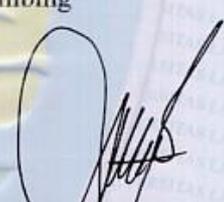
Program Studi : Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/
Pemberdayaan Masyarakat

Fakultas : Pascasarjana Multidisiplin

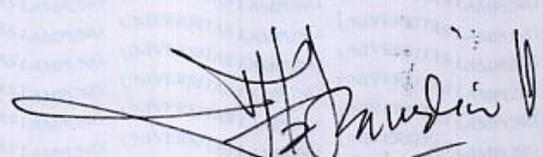
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Dame Trully Guftom, M.Si.
NIP. 196206021987032002


Dr. Indah Listiana, S.P., M.Si.
NIP. 198007232005012002

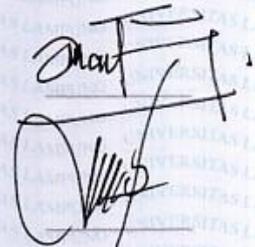
2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/
Pemberdayaan Masyarakat


Dr. Ir. Tubagus Hasanuddin, M.S.
NIP. 195903211985031016

MENGESAHKAN

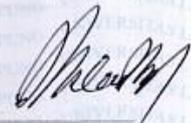
1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Ir. Dame Trully Gultom, M.Si.

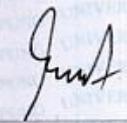


Sekretaris : Dr. Indah Listiana, S.P, M.Si.

**Penguji
Bukan Pembimbing : Muhammad Ibnu, S.P., MMA., M.Sc., Ph.D.**



Anggota : Dr. Maya Riantini, S.P., M.Si.



2. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Marhadi, M.Si.
NIP. 196403261984021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 27 November 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, adalah:

Nama : M. Rizki Al Safar
NPM : 2020021003
Fakultas : Pascasarjana Multidisiplin
Program Studi : Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat

Dengan ini menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka. Tesis ini merupakan bagian dari penelitian dengan judul : Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Melestarikan Hutan Mangrove di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 November 2023



M. Rizki Al Safar

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kotabumi, Lampung Utara pada tanggal 13 Juni 1996, sebagai anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Abas Hasan dan Ibu Rohmiyati.

Penulis memulai Jenjang pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) Al Azhar 16 diselesaikan pada tahun 2002,

Sekolah Dasar (SDN) 3 Kemiling Permai Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 28 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2011, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung Program Studi S1 Teknik Sipil melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Tahun 2019 penulis menyelesaikan Pendidikan S-1, selanjutnya pada tahun 2020 penulis mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan pascasarjana melalui program beasiswa bebas UKT dan lolos di Program Studi Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan / Pemberdayaan Masyarakat Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswa S1 penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan diantaranya pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil FT Unila (2016-2017), Gubernur BEM Fakultas Teknik Unila (2017), Ketua Umum HMI Komisariat Teknik Unila (2018), Ketua Umum HMI Cabang Bandar Lampung (2020-2022). Selama menjadi mahasiswa pascasarjana penulis juga aktif di beberapa organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan sebagai Wakil Sekretaris Karang Taruna Kota Bandar Lampung (2022-2027), Wakil Ketua Pengurus Daerah KBPP Polri Lampung (2020-2025), Wakil Sekretaris DPD

KNPI Provinsi Lampung (2022-2025), Wakil Ketua DPD KAMSRI Lampung (2023-2026), Sekretaris Umum Generasi Muda FKPPi Lampung (2023-2028), dan sebagai Ketua Umum Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam Indonesia Provinsi Lampung (2023-2026). Selain itu, penulis juga pernah mengikuti kegiatan kepemudaan dan terpilih sebagai Delegasi Terbaik dalam kegiatan *Indonesian International Youth Movement* di Turkiye 2022.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Kupersembahkan tesis ini untuk :

Semua orang yang selalu bertanya, kapan wisuda.

Kedua Bapak dan Ibu, serta Kakakku yang telah memberi dukungan moral maupun materi, serta senantiasa mendoakanku untuk meraih kesuksesan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keluarga kita, keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Semua guru-guruku dan dosen-dosenku yang telah mengajarkan banyak hal, semoga Allah membalas segala kebaikan atas ilmu yang diajarkan.

Sahabat, kanda, yunda, dan adinda, yang tiada hentinya memberikan motivasi dan selalu ada di saat suka maupun duka.

Rekan seperjuangan, teman-teman mahasiswa PPM angkatan 2020, yang telah memberikan bantuan dan motivasinya selama masa perkuliahan, semoga silaturahmi kita bisa selalu terjaga.

Untuk almamater tercinta Universitas Lampung.

Jazakumullah Khairan Katsiran Wa Jazakumullah Ahsanal Jaza

MOTTO HIDUP

Man Jadda Wajadda!

Barangsiapa yang ingin mendapatkan padi yang bagus
hendaklah menanam dengan benih yang bagus pula.

(Haji Agus Salim)

Lihatlah matamu! Dia begitu kecil, namun mampu melihat
hal-hal yang besar.

(Jalaludin Rumi)

Satu ons tindakan sama berharganya dengan satu ton
teori. (Friedrich Engels)

Masalah-masalah kita adalah buatan manusia, maka dari
itu dapat diatasi oleh manusia. Tidak ada masalah dalam
takdir manusia yang tidak dapat diselesaikan manusia.

(John F. Kennedy)

Apapun yang terjadi di dunia ini baik ataupun buruk
adalah skenario besar dari-Nya. Wahai mimpi-mimpiku,
tunggu aku menjemputmu!

(M Rizki Al Safar)

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya tesis ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul **”Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Melestarikan Hutan Mangrove di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Muhtadi, M.Si., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ir. Tubagus Hasanuddin, M.S., selaku Ketua Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat atas saran, nasehat, bimbingan, serta kritik yang membangun dalam penulisan tesis ini.
3. Ibu Dr. Ir. Dame Trully Gultom, M.Si., selaku pembimbing utama yang telah memberikan kesempatan dan dengan sabarnya memberikan dorongan, pengarahan, bimbingan selama proses penelitian dan penulisan tesis ini.
4. Ibu Dr. Indah Listiana, S.P., M.Si., selaku pembimbing kedua yang telah memberikan arahan, pengetahuan, bimbingan, kesabaran, dan saran selama menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Muhammad Ibnu, S.P., MMA., M.Sc., Ph.D. selaku pembahas pertama dan Ibu Dr. Maya Riantini, S.P., M.Si., selaku pembahas kedua yang telah memberikan saran, nasehat, bimbingan, serta kritik yang membangun dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. Ir. Sumaryo Gs., M.Si., selaku pembimbing akademik yang telah bersedia memberikan nasihat, motivasi, arahan dan bantuan selama penulisan tesis ini
7. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, Bapak Abas Hasan dan Ibu Rohmiyati terima kasih atas keikhlasan, cinta dan kasih sayang, doa, motivasi, moral serta finansial yang telah diberikan.
8. Bapak dan Ibu staff administrasi Pascasarjana Multidisiplin Unila.
9. Kakakku tersayang, M. Arif Syahputra, Rafika Dwi Syahputri, dan Fentri Puspita. Terima kasih atas doa, dukungan, bantuan, dan perhatian yang diberikan.
10. Istriku Frisca Oktari, terimakasih atas bantuan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan akhirat dan dunia kepada semua pihak atas segala bantuan yang telah diberikan. Mohon maaf untuk segala kesalahan, semoga tesis ini bermanfaat.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandar Lampung, 27 November 2023

M. Rizki Al Safar

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pemberdayaan Masyarakat	8
2.2 Konsep Dasar dan Teori Partisipasi	10
2.3 Hutan Mangrove	17
2.4 Pengelolaan Hutan Mangrove oleh Masyarakat	19
2.5 Faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat ...	21
2.6 Indikator Keberhasilan Partisipasi Masyarakat	32
2.7 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)	33
2.8 Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur	34
2.9 Kajian Penelitian Terdahulu	36
2.10 Kerangka Pemikiran	42
2.11 Hipotesis	47
III. METODE PENELITIAN	49
3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian	49
3.2 Lokasi Penelitian, Responden, dan Waktu Penelitian	55
3.3 Metode Pengumpulan Data dan Jenis Data	55
3.4 Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis	56
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	60
4.1 Gambaran Umum Lokasi	60
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Lampung Timur	60
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Pasir Sakti	64
4.1.3 Gambaran Umum Desa Purworejo	67
4.2 Karakteristik Responden	69
4.2.1 Umur Responden	69
4.2.2 Tingkat Pendidikan Formal Responden	70
4.2.3 Pendidikan Nonformal	71
4.2.4 Jenis Pekerjaan Utama	73
4.2.5 Jumlah Tanggungan Keluarga	74
4.2.6 Lama Bertempat Tinggal	75
4.2.7 Jarak Rumah dengan Lokasi Mangrove	76
4.2.8 Peran Tokoh Masyarakat	77

4.2.9	Peran Kelompok Tani	79
4.2.10	Dukungan Pemerintah	81
4.2.11	Peran <i>Non Government Organization</i>	82
4.3	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Mangrove	84
4.3.1	Perencanaan	86
4.3.2	Pelaksanaan	88
4.3.3	Evaluasi	90
4.3.4	Pemanfaatan Hasil	91
4.4	Pengujian Hipotesis	93
4.5.1	Hubungan antara umur dengan partisipasi masyarakat dalam pelestarian mangrove	94
4.5.2	Hubungan antara tingkat pendidikan formal dengan partisipasi masyarakat dalam pelestarian mangrove	95
4.5.3	Hubungan antara tingkat pendidikan non-formal dengan partisipasi masyarakat dalam pelestarian mangrove	96
4.5.4	Hubungan antara jenis pekerjaan dengan partisipasi masyarakat dalam pelestarian mangrove	97
4.5.5	Hubungan antara jumlah tanggungan keluarga dengan partisipasi masyarakat dalam pelestarian mangrove.....	98
4.5.6	Hubungan antara lama bertempat tinggal dengan partisipasi masyarakat dalam pelestarian mangrove	99
4.5.7	Hubungan antara jarak rumah dengan lokasi mangrove dengan partisipasi masyarakat dalam pelestarian mangrove ..	101
4.5.8	Hubungan antara peran tokoh masyarakat dengan partisipasi masyarakat dalam pelestarian mangrove	102
4.5.9	Hubungan antara peran kelompok tani dengan partisipasi masyarakat dalam pelestarian mangrove	103
4.5.10	Hubungan antara dukungan pemerintah dengan partisipasi masyarakat dalam pelestarian mangrove	105
4.5.11	Hubungan antara <i>non government organization</i> dengan partisipasi masyarakat dalam pelestarian mangrove	106
4.5.12	Hubungan antara partisipasi masyarakat dalam pelestarian mangrove dengan pendapatan dalam pelestarian mangrove ..	107
4.5	Pendapatan pada Pelestarian Hutan Mangrove	109
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	112
5.1	Kesimpulan	112
5.2	Saran	113
	DAFTAR PUSTAKA	114

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Luas hutan mangrove Provinsi Lampung tahun 2013 – 2021	2
2. Luas hutan mangrove Kecamatan Pasir Sakti tahun 2019 – 2021	3
3. Kajian penelitian terdahulu	36
4. Pengukuran variabel (X) faktor-faktor internal dan eksternal	50
5. Pengukuran variabel (Y) tingkat partisipasi masyarakat	53
6. Pengukuran dan definisi operasional variabel Z pendapatan masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove	54
7. Tingkat keceratan variabel bebas dan variabel terikat	59
8. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan kepadatan penduduk di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2022	62
9. Wilayah di Kabupaten Lampung Timur yang berbatasan langsung dengan mangrove/laut	63
10. Jumlah dusun dan rukun tetangga menurut desa/kelurahan di	65
11. Penggunaan lahan di Kecamatan Pasir Sakti tahun 2021	66
12. Produksi pertanian di Kecamatan Pasir Sakti tahun 2021	66
13. Produksi perikanan Kabupaten Lampung Timur tahun 2021	67
14. Sebaran responden berdasarkan kelompok umur	69
15. Sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan formal	71
16. Sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan nonformal	72
17. Sebaran responden berdasarkan jenis pekerjaan utama	73
18. Sebaran responden berdasarkan jumlah tanggungan keluarga	74

19. Sebaran responden berdasarkan lama bertempat tinggal	75
20. Sebaran responden berdasarkan jarak rumah dengan lokasi mangrove	76
21. Penilaian terhadap peran tokoh masyarakat	77
22. Penilaian terhadap peran kelompok tani	79
23. Penilaian terhadap dukungan pemerintah	81
24. Penilaian terhadap Non-Government Organization	82
25. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian mangrove	84
26. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan mangrove	86
27. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan mangrove	88
28. Tingkat partisipasi masyarakat dalam evaluasi mangrove	90
29. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil mangrove	92
30. Rekapitulasi hubungan variabel X dengan Variabel Y	94
31. Rekapitulasi hubungan partisipasi masyarakat dengan pendapatan ..	108
32. Tingkat pendapatan masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka pikir penelitian	46
2. Paradigma hubungan antar variabel penelitian	47
3. Peta batasan administrasi Kabupaten Lampung Timur	61
4. Peta administrasi wilayah Kecamatan Pasir Sakti	64
5. Peta lokasi penelitian di Desa Purworejo	68

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan ekosistem mangrove terluas di dunia serta keanekaragaman hayati yang tinggi. Hutan mangrove adalah suatu vegetasi hutan tropis dan sub tropis yang didominasi oleh pohon mangrove yang tumbuh dan berkembang di daerah pasang surut yang bertujuan sebagai pelindung pantai dan sebagai tempat hidup mamalia, burung, ikan dan *crustacea*. Berdasarkan Peta Mangrove Nasional yang resmi dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018), diketahui bahwa total luas mangrove Indonesia seluas 3.364.076 Ha. Dari 3.364.076 Ha mangrove Indonesia terdapat tiga klasifikasi kategori kondisi mangrove sesuai dengan persentase tutupan tajuk, yaitu mangrove lebat, mangrove sedang, dan mangrove jarang. Merujuk pada SNI 7717-2020, kondisi mangrove lebat adalah mangrove dengan tutupan tajuk $> 70\%$, mangrove sedang dengan tutupan tajuk 30-70%, mangrove jarang dengan tutupan tajuk $< 30\%$.

Keberadaan hutan mangrove yang menutupi sekitar 81% pantai di Provinsi Lampung dapat memberikan berbagai manfaat, diantaranya adalah sebagai stabilisator kondisi pantai, mencegah terjadinya abrasi dan intrusi air laut, sebagai sumber keanekaragaman biota akuatik dan non akuatik, sebagai sumber bahan yang dapat dikonsumsi masyarakat dan lain sebagainya. Keberadaan hutan mangrove dapat memberikan banyak manfaat, baik secara fisik, biologis, maupun ekonomi, namun pemanfaatan yang berlebihan (khususnya pemanfaatan ekonomi) oleh masyarakat dapat menyebabkan kerusakan ekosistemnya.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai wilayah hutan mangrove terkecil ketiga di Pulau Sumatera (Yuliasamaya & Hilmanto, 2014). Berdasarkan data luas hutan mangrove di Provinsi Lampung yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (2022) menunjukkan bahwa luas wilayah hutan mangrove mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas hutan mangrove Provinsi Lampung tahun 2013 – 2021

Tahun	Luas hutan mangrove (Ha)
2013 – 2015	2.537
2016 – 2018	9. 823
2019 – 2021	17.110

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Tabel 1 menunjukkan luas hutan mangrove yang di evaluasi setiap tiga tahun mengalami peningkatan setiap waktunya, peningkatan luas wilayah hutan mangrove sebesar 7.287 ha/tiga tahunnya. Provinsi Lampung memiliki 7 kabupaten yang memiliki hutan mangrove yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten Lampung Timur adalah kabupaten yang memiliki 24 kecamatan, dan terdapat 2 kecamatan yang memiliki hutan mangrove yaitu Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti. Kecamatan Pasir Sakti merupakan kecamatan terluas yang memiliki hutan mangrove jika dibandingkan dengan Kecamatan Labuhan Maringgai. Data luas hutan mangrove Kecamatan Pasir Sakti tahun 2013 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas hutan mangrove Kecamatan Pasir Sakti tahun 2019 – 2021

Tahun	Luas hutan mangrove (Ha)
2019	350
2020	361
2021	374

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan luas wilayah hutan mangrove pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 13 ha sehingga membuat Kabupaten Lampung Timur memiliki potensi besar dalam hal pembudidayaan mangrove. Namun berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa masih tingginya kerusakan hutan mangrove yang disebabkan adanya pembukaan tambak secara ilegal. Kegiatan tambak ini menggunakan pestisida, antibiotik, dan pakan buatan yang menghasilkan limbah sehingga dapat mencemari lingkungan sekitarnya, termasuk ekosistem mangrove. Pencemaran ini dapat membahayakan kehidupan laut dan mengganggu ekosistem di dalamnya. Sejalan dengan penelitian (Lembaga Penelitian UNILA, 2010), bahwa lebih dari 50% kerusakan hutan mangrove telah terjadi di pesisir Timur Lampung disebabkan oleh konversi lahan, pencemaran pantai, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan mangrove sebagai penyangga kehidupan darat dan lautan. Rusaknya hutan mangrove berdampak pada masyarakat karena tanaman mangrove merupakan daerah pencarian makan bagi ikan dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

Kurangnya kesadaran dan ketertarikan masyarakat dalam pengelolaan mangrove baik secara pribadi maupun kelompok dengan anggota masyarakat lainnya dapat menghambat keberlangsungan mangrove (Qurniati et al, 2017). Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove juga menjadi salah satu faktor terjadinya kerusakan hutan mangrove. Masyarakat setempat bersikap acuh tak acuh dalam memahami dan mengelola pentingnya hutan mangrove dalam menjaga lingkungan, perlindungan dari bencana alam, dan penopang mata

pencaharian masyarakat sekitar. Semua masalah ini mengancam keberlanjutan ekosistem mangrove, yang memiliki nilai ekologis, ekonomis, dan sosial yang besar. Oleh karena itu, perlindungan dan pelestarian hutan mangrove sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut, melindungi pesisir dari erosi, dan mendukung mata pencaharian masyarakat lokal.

Upaya meminimalisir dampak yang lebih besar terhadap tekanan sumber daya mangrove, maka diperlukan pemberdayaan masyarakat pesisir dilakukan secara intensif sehingga dapat menjadikan masyarakat sebagai komponen utama penggerak partisipatif dalam pengembangan tanaman mangrove. Keberhasilan pengelolaan ekosistem hutan mangrove ditentukan oleh keterlibatan masyarakat yang bermukim di daerah pantai sebagai mitra dalam pengelolaan sumber daya alam pantainya khususnya hutan mangrove (Melana & Courtney, 2000). Pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat merupakan salah satu strategi pengelolaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Keberhasilan pengelolaan hutan mangrove juga ditunjukkan oleh meningkatnya kualitas dan kuantitas hutan yaitu bertambahnya luasan hutan, indeks keragaman, dan kerapatan vegetasi hutan. Indikator keberhasilan tersebut adalah tingkat keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Ada banyak variabel yang diperkirakan saling berinteraksi dan berkorelasi dalam membentuk hubungan dalam partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat secara individu maupun kelompok dengan sadar dan penuh tanggung jawab dalam pengelolaan hutan mangrove. Didukung dengan teori keterlibatan (*Involvement Theory*) yang menyatakan bahwa masyarakat yang terlibat secara aktif dalam kegiatan pelestarian mangrove cenderung memiliki rasa kepemilikan terhadap sumber daya alam tersebut. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pelestarian akan lebih mungkin untuk merasa memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan tersebut. Partisipasi masyarakat pada penelitian ini

berupa partisipasi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pentingnya partisipasi dalam sebuah program menurut yaitu: (1) partisipasi merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap anggota, (2) masyarakat akan lebih percaya jika lebih dilibatkan dalam proses dan perencanaannya, karena mereka akan mempunyai rasa memiliki terhadap suatu kegiatan, (3) suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam suatu kegiatan yang bersifat membangun (Conyers, 1991).

Kegiatan rehabilitasi berbasis partisipasi masyarakat perlu dilakukan untuk memulihkan kondisi vegetasi mangrove yang telah rusak agar dapat menjalankan kembali fungsinya dengan baik serta guna tercapainya pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove diperlukan pengetahuan tentang nilai strategis keberadaan hutan mangrove yang bermanfaat bagi masyarakat. Upaya mewujudkan program pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu dibutuhkan partisipasi masyarakat yang tinggi dan setepat mungkin. Masyarakat yang hidup di sepanjang pantai dan telah memanfaatkan sumberdaya secara tradisional dapat terpengaruh oleh peraturan dan prosedur baru. Oleh karena itu, masyarakat diikutsertakan dalam pembentukan kebijaksanaan dan aturan terhadap pemanfaatan sumberdaya (Dahuri & Rochimin, 1996).

Kecamatan Pasir Sakti memiliki potensi besar dalam pemanfaatan hutan mangrove yang dikelola oleh KTH Mutiara Hijau I yang sudah mendapatkan berbagai prestasi, salah satunya pada tahun 2022 mendapatkan penghargaan berupa Kalpataru sebagai penyelamat lingkungan yang di berikan pada KTH mutiara hijau I oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2021. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mengelola, menjaga dan melestarikan sumberdaya mangrove, agar kondisi alam maupun ekosistem laut tidak rusak. Melalui partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan mangrove dengan sendirinya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam melestarikan hutan mangrove di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah penelitian dapat disyaratkan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam melestarikan hutan mangrove?
2. Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam melestarikan hutan mangrove di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur?
3. Bagaimana hubungan partisipasi terhadap kontribusi pendapatan masyarakat pada pelestarian hutan mangrove di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur?
4. Bagaimana tingkat pendapatan masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah:

1. Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan melestarikan hutan mangrove.
2. Mengetahui apa saja faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam melestarikan hutan mangrove di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur.
3. Menganalisis hubungan partisipasi terhadap kontribusi pendapatan masyarakat pada pelestarian hutan mangrove di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur.
4. Mengetahui tingkat pendapatan masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Memberikan gambaran mengenai keterlibatan masyarakat terhadap kondisi hutan mangrove yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur.
2. Pada kawasan administrasi hutan mangrovenya dapat diusulkan tindakan pemeliharaan dan rehabilitasi terhadap pengelolaan hutan mangrove Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti kawasan pesisir pantai, Lampung Timur.
3. Menjadi bahan referensi untuk mengetahui dan memahami tentang pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengembangan tanaman mangrove di Kabupaten Lampung Timur, serta memperkaya khasanah penelitian di bidang pemberdayaan masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan secara etimologis merupakan asal kata dari “daya” yang artinya adalah kemampuan. Mengacu pada arti tadi, maka secara definisi pemberdayaan adalah proses dan usaha menuju berdaya, atau kegiatan dari seseorang yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Rananda, 2021).

Pendefinisian pemberdayaan masyarakat banyak diartikan oleh beberapa ahli baik dalam atau luar negeri. Menurut ahli Sosiologi Sumodiningrat (2000) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk memaksimalkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri untuk menjadi mandiri dan berdaya. Dalam konteks ini ada pihak yang memberdayakan dan diberdayakan.

Pemberdayaan lebih ditekankan pada aspek ekonomi kerakyatan, karena masyarakat diharapkan mampu mengembangkan dan juga mengarahkan segala potensi sumber daya terutama di pedesaan (Mubyarto, 1998). Beliau juga menyatakan masyarakat lebih mengetahui kondisi wilayah dan jenis usaha yang kedepannya akan membentuk lembaga dan juga sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat sekitar wilayah tersebut.

1. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian dalam berfikir, kemudian bertindak dan mampu mengendalikan apa yang menjadi hakikat dari

masyarakat yang mandiri. Kemandirian yang dirasakan oleh masyarakat merupakan suatu proses dan kondisi yang dimulai untuk mampu memikirkan, kemudian memutuskan dan juga memecahkan masalah-masalah yang belum atau akan dihadapi dengan menggunakan kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik (Sumodiningrat, 2000).

2. Tahap-tahap Pemberdayaan

Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk bisa mandiri, meski dari segala sisi harus tetap dijaga kemandiriannya agar tidak jatuh lagi (Sumodiningrat, 2000). Dari pendapat ahli tadi mampu diketahui bahwa kemandirian didapatkan dari proses belajar bertahap sampai benar-benar berdaya dengan tidak melupakan pemeliharaan dan semangat agar tidak mengalami kemunduran lagi.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat tadi, disebutkan terbentuk dari proses belajar yang bertahap sehingga mampu untuk menjadi mandiri. tahapan-tahapan pemberdayaan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Tahapan pemberdayaan masyarakat

Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat	
Tahap 1	Pembentukan perilaku dan kesadaran menuju pada pola pikir peduli dan merasa dirinya membutuhkan kemampuan juga kapasitas diri.
Tahap 2	Tranformasi wawasan dan pengetahuan, kemudian memiliki keterampilan agar mampu mempunyai peran pembangunan
Tahap 3	Kemampuan intelektualitas, kecakapan dalam keterampilan sehingga memiliki inisiatif dan inovatif untuk mengantarkan pada sebuah kemandirian.

Sumber: Sumodiningrat (2000)

3. Bentuk-bentuk Kegiatan Pemberdayaan

Pemberdayaan harus dilakukan secara terus-menerus sampai tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dengan

semua segmen yang diperintah. Ada berbagai bentuk program pemberdayaan, diantaranya sebagai berikut :

a. Pemberdayaan Politik

Dalam hal ini pemberdayaan politik digunakan untuk meningkatkan daya tawar (*bargaining position*) yang diperintah oleh pemerintah. Daya tawar (*bargaining position*) ini dimaksudkan agar yang diperintah mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian tanpa merugikan pihak yang lain.

b. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi digunakan sebagai upaya meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen agar berfungsi sebagai penanggung dari dampak negatif terjadinya pertumbuhan, pemikul beban pembaungan, kegagalan program, dan akibat kerusakan lingkungan.

c. Pemberdayaan Sosial-budaya

Pemberdayaan sosial-budaya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk meningkatkan nilai manusia (*human dignity*), penggunaan (*human utilization*), dan perlakuan yang adil kepada manusia.

2.2 Konsep Dasar dan Teori Partisipasi

1. Pengertian Partisipasi

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “participation” yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (Echols & Shadily, 2000).

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga,

waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan (Sumaryadi, 2010). Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Jalal & Supriadi (2001) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya (Listiana, dkk., 2021).

Menurut Tilaar (2009) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Menurut Sundari ningrum dalam Sugiyah (2001) mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

a) Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

b) Partisipasi Tidak Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Astuti (2011), membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama,

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan.

3. Partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan, dan
4. Partisipasi dalam evaluasi.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

2. Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi menurut (Viantimala dkk., 2020) terbagi atas:

a) Partisipasi Vertikal

Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program

pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.

b) Partisipasi Horizontal

Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Menurut Basrowi (2011) partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Partisipasi Fisik

Partisipasi fisik adalah partisipasi yang dilakukan dalam bentuk menyelenggarakan sebuah pendidikan maupun usaha-usaha. Seperti usaha sekolah, membuat beasiswa, dan juga membantu pemerintah dengan cara membangun gedung untuk masyarakat atau dapat juga bentuk bantuan yang lain.

b) Partisipasi Non Fisik

Partisipasi non fisik adalah partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam menentukan tujuannya. Seperti dimana harus menempuh pendidikan nasional dan juga meratanya wawasan maupun keinginan masyarakat untuk menuntut ilmu dengan cara melalui pendidikan. Sehingga pemerintah tidak kesulitan dalam memberikan arahan kepada masyarakat untuk bersekolah.

3. Tahapan Partisipasi Masyarakat

Mulyadi (2009) menyebutkan bahwa di dalam partisipasi masyarakat terdapat beberapa tahapan partisipasi yang lebih nyata terjadi dimasyarakat diantaranya yaitu:

a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan keputusan melalui rencana pembangunan. Seperti keikutsertaan dalam menghadiri rapat, memberikan pendapatnya dalam kegiatan rapat desa, memberikan informasi pada rapat pembangunan desa, dan ikut serta dalam proses pembuatan keputusan.

- b) Partisipasi dalam pelaksanaan
Merupakan keterlibatan masyarakat didalam kegiatan pelaksanaan pembangunan desa bukan hanya pada tahap perencanaan. Pada tahap pelaksanaan ini masyarakat bisa memberikan kontribusi yang lebih konkrit seperti kontribusi dengan tenaga, kontribusi dengan uang, kontribusi dengan bahan.
- c) Partisipasi dalam kemanfaatan
Merupakan wujud dari peran masyarakat dalam keikutsertaan berpartisipasi di desanya. Apakah keikutsertaannya tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih positif bagi perkembangan pemerintah dan masyarakat desa. Bentuk keikutsertaan masyarakat tersebut dapat berupa mengikuti kegiatan dalam memelihara kebersihan rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggal, ikut serta dalam kegiatan keagamaan, mengikuti kegiatan memelihara keamanan lingkungan secara suka rela, dan juga mengikuti kegiatan yang diadakan desa seperti kelompok usaha di bidang ekonomi,
- d) Partisipasi pada keikutsertaan dalam melakukan evaluasi
Merupakan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan memberikan penilaian pada pelaksanaan hasil dari mulai tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan. Keikutsertaan masyarakat dalam bentuk kritik terhadap jalannya pembangunan, memberikan argumen maupun saran terhadap jalannya pembangunan, dan yang terpenting adalah memberikan penilaian yang kemudian disampaikan kepada pemerintah desa sebagai bahan untuk evaluasi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tahapan partisipasi masyarakat terdiri dari partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan desa, partisipasi dalam kemanfaatan bagi pemerintah desa, dan juga partisipasi dalam keikutsertaan pada pengawasan dan memberikan penilaian pada tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan.

4. Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat

Menurut Mulyadi (2009) mengatakan bahwa partisipasi ditentukan oleh beberapa faktor yaitu:

- a) Sesuai dengan Kebutuhan masyarakat.
- b) Merupakan kepentingan dan minat masyarakat.
- c) Sesuai dengan adat istiadat masyarakat.
- d) Sifatnya mengikat setiap anggota masyarakat yang satu dengan yang lain.

Selain itu faktor pendukung terjadinya partisipasi masyarakat juga diungkapkan oleh Khairuddin (1992) bahwa suatu partisipasi yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilihat dari segi motivasinya, karena ada paksaan dari atasannya, karena hanya mengikuti anggota masyarakat yang lain sebagai rasa solidaritas antar masyarakat, dan kesadaran dari anggota masyarakat tersebut.

Menurut Ndraha (1987) bahwa masyarakat ikut berpartisipasi apabila:

- a) Adanya Organisasi yang dikenal. Partisipasi tersebut dilakukan melalui sebuah organisasi yang telah ada di tengah-tengah anggota masyarakat.
- b) Adanya Kebermanfaatan Partisipasi. Partisipasi tersebut dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat.
- c) Manfaat yang diperoleh dengan ikut berpartisipasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan maupun keinginan masyarakat.
- d) Peran Masyarakat. Pada setiap proses partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat harus ada kendali yang dilakukan masyarakat.

Dari pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor pendukung partisipasi masyarakat di tentukan oleh kebutuhan masyarakat, kepentingan dan minat masyarakat, adat istiadat, dan yang paling penting adalah sifatnya yang mengikat.

5. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Suatu masyarakat untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat

tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut pendapat (Adisasmita, 2006):

- a) Sikap masa bodoh, apatis dan juga sifat malas. Selain itu tidak adanya keinginan untuk merubah keadaan tersebut.
- b) Adanya makna–makna tipologi. Merupakan ciri fisik dari suatu wilayah, kedalaman, ketinggian, luas wilayah atau bisa dikatakan sebagai kondisi dari suatu wilayah tertentu.
- c) Dipengaruhi oleh letak geografisnya.
- d) Jumlah penduduk.
- e) Keadaan ekonomi desa tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat itu terdiri dari beberapa faktor seperti sikap masyarakat yang acuh tak acuh terhadap perubahan dimasyarakatnya. Selain itu faktor yang kedua adalah kondisi geografis tempat tinggal masyarakat tersebut dan yang ketiga adalah ekonomi desa tersebut.

Masyarakat setempat yang tinggal di sekitar hutan mangrove menjadi bagian yang sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan pengelolaan kawasan tersebut. Hal ini disebabkan karena masyarakat setempat sangat tergantung kepada kondisi dan potensi sumberdaya alam serta lebih merasakan dampak di kawasan tersebut, atau dapat dikatakan bahwa baik buruknya pengelolaan ekosistem mangrove tergantung dari partisipasi masyarakat setempat.

Partisipasi masyarakat menurut Adi (2007) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif dan solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi merupakan suatu tindakan untuk mengambil bagian pada kegiatan tertentu demi mencapai hasil semaksimal mungkin dari tujuan

kegiatan. Partisipasi menurut Sastropoetra (1988) diartikan sebagai keterlibatan komunitas setempat yang secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan.

Menurut Wardoyo (1992) partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan. Keikutsertaan tersebut terbentuk sebagai akibat terjadinya interaksi sosial antara individu atau kelompok masyarakat yang lain dalam pembangunan. Soerjono (2009) juga menyatakan bahwa partisipasi mencakup tiga hal, yaitu:

1. Partisipasi meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Partisipasi adalah suatu konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Partisipasi juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi sosial masyarakat.

2.3 Hutan Mangrove

1. Pengertian Mangrove

Hutan mangrove merupakan salah satu bentuk ekosistem hutan yang unik dan khas, terdapat di daerah pasang surut di wilayah pesisir, pantai, dan pulau-pulau kecil serta merupakan sumber daya alam yang sangat potensial. Hutan mangrove memiliki nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi. Fungsi ekonomi hutan mangrove di antaranya sebagai penyedia kayu, daun-daunan sebagai bahan baku obat-obatan dan lain-lain. Fungsi ekologis sebagai penyedia nutrien bagi biota perairan, tempat pemijahan dan asuhan bagi berbagai macam biota, penahan abrasi, amukan angin taufan, dan tsunami, penyerap limbah, pencegah intrusi air laut dan lain sebagainya (Dahuri & Rochimin, 1996).

Setiawan & Purwanti (2017) menyatakan mangrove adalah berbagai jenis vegetasi dari tingkat sedang hingga tinggi yang tumbuh disepanjang garis pantai tropis dan subtropis. dan semak-semak yang tumbuh disepanjang daerah pasang surut atau daerah muara sungai.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa hutan mangrove merupakan salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah rawa dan atau padat. Umumnya jenis pohon yang dapat tumbuh di hutan bakau sangat terbatas, dikarenakan airnya yang bersifat payau.

2. Ekosistem Mangrove

Kawasan mangrove merupakan habitat (rumah) bagi berbagai jenis burung, reptilia, mamalia dan jenis-jenis kehidupan lainnya, sehingga kawasan mangrove menyediakan keanekaragaman (biodiversity) dan plasma nutfah yang tinggi serta berfungsi sebagai sistem penunjang kehidupan. Dilihat dari fungsi fisik, maka dengan sistem perakaran dan kanopi yang rapat serta kokoh, kawasan mangrove juga berfungsi sebagai pelindung daratan dari gempuran gelombang, tsunami, dan perembesan air laut lainnya. Selanjutnya dinyatakan bahwa potensi ekonomi mangrove diperoleh dari tiga sumber utama, yaitu hasil kawasan, perikanan estuarin dan pantai, serta wisata alam. Selain itu, kawasan mangrove dapat dimanfaatkan kayunya secara lestari untuk bahan bangunan, arang (charcoal) dan bahan baku kertas. Kawasan mangrove juga merupakan pemasok larva ikan, udang dan biota laut lainnya (Nanlohy et al, 2014).

Fungsi ekosistem mangrove di wilayah pesisir bukan hanya penting sebagai pelindung fisik, tetapi juga sebagai bagian terintegrasi dari ekosistem wilayah pesisir lainnya, seperti ekosistem terumbu karang dan ekosistem padang lamun (Pontoh, 2011). Keberadaan mangrove dapat memberikan berbagai manfaat, diantaranya ialah sebagai stabilisator kondisi pantai, mencegah terjadinya abrasi dan intrusi air laut, sebagai sumber keanekaragaman biota akuatik dan non-akuatik, sebagai sumber bahan yang dapat dikonsumsi masyarakat dan lain sebagainya (Yuliasamaya & Hilmanto, 2014).

Selain memiliki fungsi ekologi, mangrove juga memiliki fungsi sosial ekonomi yang bermanfaat dalam menopang kehidupan ekonomi

masyarakat. Fungsi sosial ekonomi mangrove dapat diperoleh secara optimal dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Persepsi responden mengenai fungsi sosial-ekonomi mangrove perlu diukur sebagai salah satu cara untuk mengetahui kontribusi sosial-ekonomi mangrove bagi kehidupan masyarakat (Setiawan & Purwanti, 2017).

2.4 Pengelolaan Hutan Mangrove oleh Masyarakat

Pengelolaan mangrove yakni sebuah usaha yang sangat sederhana untuk dilakukan, karena kegiatan ini sangat membutuhkan sifat akomodatif terhadap segenap pihak yang berada di sekitar kawasan dan di luar kawasan. Pada dasarnya kegiatan ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan dari berbagai kepentingan. Namun, sifat akomodatif akan lebih dirasakan manfaatnya bila mana keberpihakan kepada masyarakat yang sangat rentan terhadap sumberdaya mangrove, diberikan bagian porsi yang lebih besar. Pengelolaan berbasis masyarakat mengandung arti keterlibatan langsung masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam disuatu kawasan. Mengelola disini mengandung arti masyarakat memikirkan, merencanakan, mengimplementasikan, memonitor, dan mengevaluasi sesuatu yang menjadi kebutuhannya, baik dalam hal perlindungan, pemanfaatan hasil dan rehabilitasi hutan mangrove (Amal & Baharuddin, 2016).

Upaya untuk memperbaiki kawasan mangrove yang sudah rusak serta usaha yang harus dilakukan untuk melestarikannya adalah sebagai berikut (Iwang, 2018):

1. Penanaman kembali mangrove sebaiknya melibatkan masyarakat;
2. Pengaturan kembali tata ruang wilayah pesisir;
3. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga memanfaatkan mangrove secara bertanggung jawab;
4. Izin usaha dan lainnya hendaknya memperhatikan aspek konservasi.;
5. Peningkatan pengetahuan masyarakat dan menerapkam kearifan lokal tentang konservasi;
6. Peningkatan pendapatan masyarakat pesisir;
7. Penegakan hukum

Pengelolaan masyarakat dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah setempat (Tulungen, 2002). Pengelolaan ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan suatu pengelolaan. Masyarakat mempunyai kemampuan untuk memperbaiki kualitas hidupnya sendiri sehingga yang diperlukan hanyalah dukungan untuk mengelola dan menyadarkan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan dukungan pemerintah memegang peranan penting dalam memberikan pengarahannya, bantuan teknis serta pengambilan keputusan sehingga sangat penting untuk melibatkan masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama dalam pengelolaan suatu kawasan pesisir.

Pengelolaan sumber daya pesisir oleh masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab, dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumber dayanya sendiri dengan terlebih dahulu mendefinisikan kebutuhan, keinginan, tujuan serta aspirasinya (Nikijuluw, 2002). Pengelolaan ini menyangkut juga pemberian tanggung jawab kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang pada akhirnya menentukan dan berpengaruh pada kesejahteraan hidup mereka.

Pemberdayaan masyarakat pesisir secara struktural maupun kultural perlu dipahami adanya keunikan karakteristik sosial nelayan yang tentunya menuntut adanya pendekatan yang unik pula. Namun terdapat benang merah prinsip-prinsip penting pemberdayaan yang digunakan untuk seluruh konteks komunitas nelayan antara lain: prinsip tujuan, prinsip pengetahuan dan penguatan nilai lokal, prinsip keberlanjutan (*sustainability*), prinsip ketepatan kelompok sasaran, serta prinsip kesetaraan gender bagi masyarakat pengelola (Satria, 2002).

Partisipasi atau peran serta masyarakat yang bersifat interaktif dan swakarsa dibutuhkan syarat dan kondisi tertentu, yaitu (Soedarisman, 2001):

1. Adanya masyarakat yang berdaya sehingga dapat berfungsi secara sosial, ekonomi bahkan politik.
2. Adanya dialog yang setara antara seluruh stakeholder baik Lembaga pemerintah maupun masyarakat sejak persiapan, pelaksanaan maupun pengendalian seluruh kegiatan.
3. Adanya kejelasan kewajiban, hak dan tanggung jawab seluruh stakeholders.

Kemampuan masyarakat untuk mewujudkan dan mempengaruhi arah serta pelaksanaan suatu program ditentukan dengan mengandalkan power yang dimilikinya sehingga pemberdayaan (*empowerment*) merupakan *central yheme* atau jiwa partisipasi yang sifatnya aktif dan kreatif (Tjokrowinoto, 1996).

2.5 Faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat dipengaruhi berbagai faktor yang dapat mendorong maupun faktor yang menghambat partisipasi masyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan, sifat dari faktor tersebut dapat mendukung keberhasilan namun juga dapat menghambat keberhasilan program atau kegiatan.

Faktor-faktor yang merupakan variabel-variabel untuk mengamati tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove adalah faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor internal disebut juga karakteristik yang melekat pada individu bersangkutan yang dapat menggerakkan seseorang untuk berpartisipasi. Faktor-faktor eksternal adalah faktor penggerak dari luar individu tetapi mempunyai pengaruh terhadap partisipasi seseorang.

Faktor-faktor internal berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok di dalamnya (Slamet, 1994). Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan

penghasilan serta lamanya tinggal. Variabel faktor eksternal adalah: intensitas penyuluhan tentang ekosistem mangrove, aktifitas kelompok tani dalam rehabilitasi atau pengelolaan mangrove, manfaat atau fungsi mangrove yang diketahui responden. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi non pemerintah yang terlibat dalam rehabilitasi dan pelestarian mangrove serta keterlibatan pemerintah dalam rehabilitasi dan pelestarian mangrove baik dalam bentuk program, kegiatan maupun proyek. Berikut ini uraian dari faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat :

1. **Umur**

Umur petani akan mempengaruhi kemampuan fisik dan respon terhadap hal-hal yang baru dalam menjalankan usahatani. Tingkatan umur menurut BKKBN (2013) yakni kategori usia muda (0-14 tahun), usia produktif (15-64 tahun), dan usia lanjut (+65 tahun). Kelompok orang tua akan melahirkan pola tindakan yang pasti berbeda dengan kelompok anak-anak muda. Umur juga dapat menggambarkan pengalaman dalam diri seseorang sehingga terdapat keragaman tindakannya berdasarkan usia yang dimiliki.

Usia produktif umumnya tingkat kemauan, semangat dan kemampuan untuk bekerja cenderung lebih tinggi. Semakin muda petani biasanya mempunyai semangat untuk ingin tahu apa yang belum mereka ketahui, sehingga dengan demikian mereka berusaha untuk lebih cepat melakukan adopsi inovasi walaupun sebenarnya mereka masih belum berpengalaman dalam hal adopsi inovasi tersebut (Soekartawi, 1999). Semakin tua (di atas 50 tahun), biasanya semakin lamban mengadopsi inovasi, dan cenderung hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah biasa diterapkan oleh warga masyarakat setempat (Soerjono, 2009). Viantimala dkk., (2020) menyatakan bahwa petani berusia lebih tua biasanya cenderung sangat konservatif dalam menyikapi perubahan teknologi. Berbeda dengan petani yang berusia lebih muda. Makin

muda umur petani, biasanya mempunyai semangat ingin tahu hal-hal yang belum diketahui, sehingga petani muda berusaha untuk lebih cepat melakukan anjuran dari kegiatan penyuluhan. Menurut Desmania (2018); Rosyida (2021) menyatakan bahwa usia mempengaruhi nyata terhadap tingkat adopsi teknologi petani.

2. Pendidikan Formal

Menurut Viantimala (2020) Pendidikan adalah struktur dari suatu sistem pengajaran yang kronologis dan berjenjang lembaga pendidikan mulai dari pra sekolah sampai dengan perguruan tinggi. Mereka yang berpendidikan tinggi adalah relatif lebih cepat dalam melaksanakan adopsi inovasi. Begitu pula sebaliknya mereka yang berpendidikan rendah, mereka agak sulit untuk melaksanakan adopsi inovasi dengan cepat (Soekartawi, 2003). Tingkat pendidikan formal yang dimiliki petani dapat mempengaruhi kemampuan petani dalam menjalankan usahatannya, karena tingkat pendidikan formal akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan pola pikir sehingga petani yang memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi umumnya akan lebih cepat menyerap dan menguasai serta menerapkan setiap informasi yang disampaikan oleh penyuluh (Listiana dkk, 2018). Menurut Ronsumbre & Ihsannudin (2021) dan Rosyida (2021) menyatakan bahwa pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap adopsi teknologi petani.

3. Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal menurut Tampubolon (2017) merupakan suatu kegiatan pendidikan di luar sistem pendidikan formal dan bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat dalam arti luas. Proses belajar nonformal atau pendidikan luar sekolah sangat diperlukan dewasa ini agar beragam lapisan masyarakat yang sedang tertimpa kemalangan secara bertahap dapat diajak atau didampingi ke arah kemandirian dalam mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Bentuk pendidikan nonformal tersebut, pelatihan, kursus, penataran, magang dan penyuluhan. Penyuluhan pertanian adalah suatu sistem pendidikan luar sekolah (pendidikan nonformal) untuk petani dan keluarganya dengan tujuan agar mereka mampu dan sanggup memerankan dirinya sebagai warga negara yang baik sesuai dengan bidang profesinya, serta mampu, sanggup dan berswadaya memperbaiki/meningkatkan kesejahteraan sendiri dan masyarakatnya (Slamet, 1994). Menurut Ronsumbre & Ihsannudin (2021) dan Rosyida (2021) menyatakan bahwa pendidikan nonformal memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat adopsi teknologi.

4. Pekerjaan Utama

Selain faktor umur dan pendidikan, pekerjaan merupakan faktor lain yang mempunyai keterkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pekerjaan menjadi salah satu simbol di dalam masyarakat pedesaan untuk menentukan kelas sosial. Seseorang yang mempunyai pekerjaan yang prestisius (guru, perangkat desa), di masyarakat desa telah dianggap sebagai tokoh masyarakat karena dipandang memiliki kemampuan secara spiritual maupun material yang lebih, sehingga dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan kemasyarakatan maka sebagai seorang tokoh masyarakat akan selalu mendapat peran yang signifikan (Slamet, 1994).

Seseorang yang mempunyai pekerjaan yang prestisius (guru, perangkat desa), di masyarakat desa telah dianggap sebagai tokoh masyarakat karena dipandang memiliki kemampuan secara spiritual maupun material yang lebih, sehingga dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan kemasyarakatan maka sebagai seorang tokoh masyarakat akan selalu mendapat peran yang signifikan (Ramadani & Mayarni, 2021). Pendidikan yang tinggi memberikan informasi dan persoalan yang luas tentang pembangunan, selanjutnya akan memungkinkan seseorang untuk memiliki kemampuan dan kemauan untuk berpartisipasi dalam

pembangunan yang ada di daerah setempat. Sedangkan pekerjaan juga dapat mendorong seseorang untuk berperan serta secara aktif di dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada, semakin baik pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang maka akan semakin besar peluangnya untuk dapat terlibat/dilibatkan dalam kegiatan pembangunan karena dipandang memiliki kemampuan secara spiritual maupun material yang lebih. Seseorang yang berpengalaman lebih mampu dalam melaksanakan tugas yang akan diberikan”. Jadi tanggung jawab yang diberikan disesuaikan dengan pengalaman dan ketrampilan yang dimiliki. Seseorang yang memiliki pengalaman dan ketrampilan tinggi tentang kegiatan tertentu akan memperoleh bagian tanggung jawab yang besar (Susilo, 1992).

5. Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan keluarga merupakan indikasi dalam menentukan miskin atau tidaknya suatu rumah tangga. Semakin besar jumlah anggota rumah tangga berarti semakin besar jumlah tanggungan dan akan semakin besar pendapatan yang dikeluarkan untuk biaya hidup sehingga jumlah anggota keluarga yang banyak akan mengakibatkan kondisi menjadi semakin miskin. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu akibat. Rumah tangga yang tadinya tidak miskin maupun yang miskin terbebani antara lain oleh jumlah anggota rumah tangga dan tidak produktif. Bila pendapatan rumah tangga tidak meningkat sejajar dengan beban itu maka rumah tangga itu akan menjadi miskin atau semakin miskin. Inilah salah satu penjelasan keterkaitan antara rumah tangga miskin dengan besarnya anggota rumah tangga tersebut. Jumlah tanggungan dalam rumah tangga juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan rumah tangga yang ditunjukkan dengan besarnya jumlah anggota rumah tangga yang tidak bekerja berkorelasi negatif dengan konsumsi dan pendapatan perkapita tiap anggota keluarga. jumlah tanggungan dalam rumah tangga (baik anak-anak, anggota usia produktif yang tidak bekerja dan lansia)

kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan dalam rumah tangga dan pada akhirnya terjadi kemiskinan rumah tangga (Soekartawi, 2003).

Jumlah anggota keluarga sangat menentukan jumlah kebutuhan keluarga. Semakin banyak anggota keluarga berarti semakin banyak pula jumlah kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit anggota keluarga berarti semakin sedikit pula kebutuhan yang harus dipenuhi keluarga. Sehingga dalam keluarga yang jumlah anggotanya banyak, akan diikuti oleh banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Semakin besar ukuran rumah tangga berarti semakin banyak anggota rumah tangga yang pada akhirnya akan semakin berat beban rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Demikian pula jumlah anak yang bertanggung dalam keluarga dan anggota-anggota keluarga yang cacat maupun lanjut usia akan berdampak pada besar kecilnya pengeluaran suatu keluarga. Mereka tidak bisa menanggung biaya hidupnya sendiri sehingga mereka bergantung pada kepala keluarga dan istrinya.

Anak-anak yang belum dewasa perlu dibantu biaya pendidikan, kesehatan, dan biaya hidup lainnya. Jumlah anggota keluarga adalah seluruh jumlah anggota keluarga rumah tangga yang tinggal dan makan dari satu dapur dengan kelompok penduduk yang sudah termasuk dalam kelompok tenaga kerja. Kelompok yang dimaksud makan dari satu dapur adalah bila pengurus kebutuhan sehari-hari dikelola bersamasama menjadi satu. Jadi, yang termasuk dalam jumlah anggota keluarga adalah mereka yang belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari karena belum bekerja (dalam umur non produktif) sehingga membutuhkan bantuan orang lain (dalam hal ini orang tua). Jumlah tanggungan keluarga yang bertambah membuat kebutuhan keluarga semakin meningkat pula. Diperlukan banyak biaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini dapat menjadi pendorong seseorang untuk bermigrasi untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan yang meningkat selanjutnya akan

mempengaruhi status sosial dan mutu hidup rumah tangga (Hernanto, 2003).

Jumlah tanggungan keluarga merupakan jumlah anak dan anggota keluarga lain yang seluruh biaya hidupnya menjadi tanggung jawab responden yang diukur dengan satuan jumlah orang. Semakin banyak jumlah tanggungan keluarga debitur, maka semakin tinggi jumlah pengeluarannya. Jumlah anggota keluarga menentukan jumlah kebutuhan keluarga (Saptana et al, 2013).

6. Lama Bertempat Tinggal

Lama tinggalnya memiliki keterkaitan yang kuat dengan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses keterlibatan warga dalam pertemuan, kegiatan fisik atau kerja bakti. Semakin lama seseorang tinggal dan menetap di suatu daerah pada umumnya akan memberikan pengaruh positif bagi perkembangan kehidupan psikologisnya sehingga dapat merangsang rasa memiliki yang mendalam yang pada akhirnya tumbuh kesadaran untuk memelihara, mengelola dan mengembangkan hasil pembangunan berupa perbaikan prasarana dan fasilitas yang ada.

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut (Uceng et al, 2019).

7. Jarak Rumah dengan Lokasi Penelitian

Jarak tempat tinggal menunjukkan berapa lama perjalanan yang ditempuh responden menuju tempat kerja. Jika antara tempat yang akan dituju dengan tempat dimana seseorang bertempat tinggal, relatif dapat menentukan minat dan motivasi seseorang untuk mencapainya. Semakin

dekat tempat tujuan dari tempat tinggalnya, semakin gampang dan mudah untuk dicapai atau dijangkau dan akan semakin tidak merepotkan. Menurut Asmawati (2009) bahwa semakin jauh jarak tempat tinggal petani dari saluran irigasi maka semakin berkurang tingkat partisipasi petani dan begitu pula sebaliknya. Faktor umur, luas lahan, jarak tempat tinggal dari saluran irigasi dan letak sawah dari saluran irigasi merupakan faktor yang memiliki hubungan nyata dengan tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan saluran irigasi (Putriana et al, 2018).

8. Peran Tokoh Masyarakat (*local champion*)

Local champion merupakan adanya peran seseorang atau lebih yang mempunyai inisiatif untuk melakukan perubahan dalam komunitasnya sebagai motor penggerak suatu program. Oleh karena itu biasanya lebih dari satu orang misalnya kepala desa atau perangkat desa setempat, para ketua kelompok tani/ketua gapoktan, ketua wanita tani, ketua Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan tokoh masyarakat yang ada disitu. Tokoh masyarakat seperti pamong desa, maupun ketua atau pengurus kelompok tani atau kelompok keagamaan, sesepuh (atau yang dituakan), ketua adat, posyandu, dan sebagainya penting dalam hal menggerakkan ataupun memotivasi pengembangan program RHL.

Beberapa peran penting mereka yaitu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kemandirian dan keberlangsungan hutan mangrove, dan juga keberadaan hutan mangrove untuk mencegah abrasi dan habitat hewan laut. Selain itu, terhubungnya *stakeholders* terkait pelaksanaan program RHL juga dapat menimbulkan adanya *local champion*. Menurut (Septiarani & Handayani, 2016) *local champion* mampu memainkan peran ganda yang tidak bisa didapatkan dari tokoh formal atau pemerintah.

Tujuan adanya *local champion* yaitu untuk meningkatkan partisipatif, rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang baru, semangat untuk menerapkan informasi teknologi serta untuk mendapatkan nilai manfaat secara materi

maupun non materi. Kepercayaan masyarakat terhadap *local champion* dapat menumbuhkan motivasi dan menjadikan program menuju keberlanjutan (Septiarani & Handayani, 2016). Apabila *local champion* sudah timbul di masyarakat maka itu menjadi pertanda bahwa suatu program dapat dimulai pelaksanaannya. Terpilihnya *local champion* akan memudahkan dalam menghubungkan beberapa aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tahap menikmati hasil.

9. Peran Kelompok Tani

Kelompok tani adalah kelembagaan petanian atau peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi dan sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya serta ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani yang saling mengenal, akrab, saling percaya, mempunyai kepentingan dalam berusahatani, kesamaan baik dalam hal tradisi, pemukiman, maupun hamparan lahan usahatani (Pusat Penyuluhan Pertanian, 2012). Kelompok tani merupakan sebuah lembaga yang menyatukan para petani secara horizontal dan dapat dibentuk beberapa unit dalam satu desa, bisa berdasarkan komoditas, areal tanam pertanian dan gender (Syahyuti, 2007). Fungsi kelompok tani sebagai wahana kerjasama berhubungan sangat nyata pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan serta evaluasi.

Dukungan kelompok tani merupakan bentuk peran dari kelompok tani dalam kegiatan pengadaan sarana produksi dan pelaksanaan usahatani. Bentuk kegiatan dukungan kelompok tani dalam pengadaan sarana produksi seperti pengadaan bibit, pupuk, pestisida dan tenaga kerja terkait jumlah penggunaan sarana produksi, jenis sarana produksi, dan lokasi tempat pembelian sarana produksi. Bentuk dukungan kelompok tani dalam kegiatan pelaksanaan usahatani seperti pengolahan lahan, penanaman, perawatan, pemanenan, pengolahan hasil, dan pemasaran.

10. Dukungan Pemerintah

Dukungan pemerintah sangat dibutuhkan terutama Pemerintah daerah (Pemda), seperti dukungan berupa kebijakan maupun anggaran. Kebijakan dalam bentuk peraturan daerah mengenai rehabilitasi hutan mangrove bertujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan khususnya ekosistem mangrove dan menambah pendapatan masyarakat melalui upah kerja yang diberikan kepada kelompok masyarakat pelaksana kegiatan. Alokasi dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tingkat I maupun tingkat II, dukungan dalam bentuk natural seperti bibit/benih tanaman dan pendampingan. Pemda memiliki peran penting menjadi jembatan kebijakan dari pemerintah pusat dan masyarakat lokal yang berada di wilayahnya. Oleh karena itu, kebijakan ataupun perintah dari pemerintah daerah dapat membantu masyarakat agar mampu menyelesaikan berbagai masalah di wilayah masing-masing. Dukungan terhadap kebijakan itu tersendiri dari pemerintah lokal dapat membantu pembangunan di wilayah lokal agar dapat berkembang (Soetomo, 2009).

Pendampingan adalah salah satu cara untuk mempertahankan motivasi yang tinggi dari masyarakat. Pendampingan masyarakat diperlukan juga agar mampu menambah pengetahuan mengenai kegiatan pelestarian khususnya di wilayah hutan mangrove. Selain itu, perlu juga melakukan penyusunan rencana kegiatan secara terstruktur dalam pendampingan.

11. Peran *Non Government Organization* (NGO)

Non-governmental organization atau NGO adalah entitas nirlaba yang independen dan beroperasi di luar kendali dan pengaruh pemerintah untuk tujuan kemanusiaan dan kerjasama daripada komersial. NGO adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya (Praja, 2009).

Budiman menyatakan ada dua jenis NGO, yakni pertama, NGO yang bersifat karitatif: dalam pengertian ini NGO hanya memberikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Tidak ada perubahan pada masyarakat itu sendiri. Kedua, NGO yang berusaha memberdayakan (*empowering*) masyarakat (Budiman, 1996). Secara umum NGO diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Menurut Budi Setyono, NGO merupakan lembaga/organisasi non partisan yang berbasis pada gerakan moral (*moral force*) yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik. NGO dipandang mempunyai peran signifikan dalam proses demokratisasi. Jenis organisasi ini diyakini memiliki fungsi dan karakteristik khusus dan berbeda dengan organisasi pada sektor politik pemerintah maupun swasta (*private sector*), sehingga mampu menjalankan tugas tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh organisasi pada dua sektor tersebut.

NGO memiliki peranan yang cukup penting sebagai pelaku dalam pembangunan negara, disamping lembaga-lembaga yang dibina langsung oleh pemerintah. Salah satu fokus kegiatan yang dilaksanakan oleh NGO adalah kegiatan pengelolaan sumber daya alam (Sajogyo, 1990). Para aktivis organisasi masyarakat sipil dan NGO menyadari peran sosial sebagai pengawas negara. Asumsi yang diterima secara umum adalah kekuasaan negara yang berada di tangan pemerintah seharusnya dibatasi dengan berbagai instrumen, termasuk pembatasan oleh masyarakat dengan pengawasan melalui media massa dan NGO. Tujuan dibentuknya NGO sendiri tidak dapat dilihat dari satu sisi saja (Elisabeth & Betsill, 2001). NGO bekerja di dalam banyak sektor baik di lingkup nasional maupun internasional. Betsill dan Corell melihat bahwa NGO dapat berdiri dengan beberapa tujuan. Tujuan tersebut antara lain; pertama meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu di sekitar, kedua melobi para pembuat keputusan, mampu untuk mempengaruhi kebijakan domestik maupun luar negeri, ketiga mampu untuk berpartisipasi di dalam dan beberapa tujuan

lain. Tujuan-tujuan ini kemudian diselaraskan dengan isu-isu spesifik yang menjadi konsentrasi dari dibentuknya sebuah NGO. Keberadaan dan posisi NGO ini turut mengubah relasi antara negara dengan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan sistem demokrasi yang saat ini lebih banyak diaplikasikan oleh negara-negara di dunia. Adanya NGO semakin menumbuhkan minat terhadap perkembangan demokrasi di dunia internasional. Masyarakat mencoba menyampaikan aspirasinya melalui lembaga-lembaga non profit seperti NGO. Sehingga peran NGO menjadi lebih besar lagi di dalam pengambilan keputusan di sebuah Negara (Elisabeth & Betsill, 2001).

NGO dapat berperan untuk menyeimbangkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Suhatmansyah, 2009). Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (Undang-Undang Nasional Republik Indonesia Pasal 28 C Ayat 2, 1945). Berdasarkan Undang-Undang Nasional Republik Indonesia Pasal 28 E Ayat 3 Tahun 1945 mengatakan bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. NGO menjadi media aspirasi bagi masyarakat untuk dapat bersuara dan menentukan kebijakan pemerintah. Dengan adanya NGO banyak isu-isu yang seingkali luput dari perhatian pemerintah dapat menjadi terangkat kembali. Seperti isu lingkungan, kesadaran akan penyakit, energi, dan lain-lain.

2.6 Indikator Keberhasilan Partisipasi Masyarakat

Menurut penelitian Erwiantono (2006), untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu partisipasi dalam masyarakat dapat diketahui dari beberapa indikator yang dinilai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan menikmati hasil. Berikut penjelasannya:

1. Tahap Perencanaan

Dalam tahap perencanaan diukur dengan melihat jumlah kehadiran warga dalam rapat maupun penyuluhan sebelum adanya kegiatan penanaman mangrove serta keaktifan dalam memberikan berbagai usulan maupun pertanyaan dalam rapat.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ini, partisipasi masyarakat dilihat dalam melakukan kegiatan penanaman mangrove tersebut, baik atas inisiatif individu, kelompok maupun yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun LSM (Alsusanti,2021). Dalam pelaksanaan ini indikator yang digunakan adalah frekuensi dalam pelaksanaan kegiatan, insiatif kegiatan dan kemauan untuk mencapai keberhasilan.

3. Tahap Evaluasi

Partisipasi masyarakat yang dilihat pada tahap ini meliputi pemeliharaan. Pengawasan dan pertemuan evaluasi hasil kegiatan yang telah dilakukan.

4. Tahap Menikmati Hasil

Keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap ini dapat dilihat dari seberapa sering masyarakat menerima manfaat setelah adanya rehabilitas dan pemeliharaan dari hutan mangrove. Manfaat yang diterima masyarakat berupa hasil tangkapan ikan dan udang yang lebih banyak, mengurangi intensitas banjir dan lain sebagainya.`

2.7 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)

Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dilaksanakan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, untuk menjamin terjaganya daya dukung, produktivitas dan peranan hutan dan lahan dalam mendukung sistem penyangga kehidupan. Kegiatan RHL ini dilaksanakan baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Upaya RHL ini dilaksanakan dengan dengan pola vegetatif maupun sipil teknis. Upaya RHL dalam kawasan hutan dilaksanakan dengan reboisasi. Reboisasi dilaksanakan pada seluruh kawasan hutan kecuali

pada Cagar Alam dan Zona Inti Taman Nasional. Upaya RHL di luas Kawasan hutan (Areal Penggunaan Lain) dilaksanakan dengan pembangunan Hutan Rakyat dan Penghijauan Lingkungan. Upaya RHL yang dilaksanakan dengan pola sipil teknis baik di dalam kawasan hutan (bila diperlukan) maupun di luar kawasan hutan seperti pembangunan dam pengendali, dam penahan, sumur resapan, *gully plug*, teras siring, dan lain-lain.

Kawasan hutan mangrove dan pantai merupakan pendukung asosiasi antara ekosistem laut dan ekosistem daratan sekaligus pelindung utama dari adanya abrasi daratan, pengurangan pencemaran laut dan penyokong habitat biota laut yang bernilai ekonomi tinggi. Luas hutan mangrove dan pantai di Indonesia sebesar 3.489.140,68 Ha (tahun 2015) atau setara dengan 23% ekosistem mangrove dunia yaitu dari total luas 16.530.000 Ha. Dari luas mangrove di Indonesia, diketahui seluas 1.671.140,75 Ha dalam kondisi baik, sedangkan areal sisanya seluas 1.817.999,93 Ha sisanya dalam kondisi rusak. Luas penutupan lahan mangrove di Indonesia, baik pada hutan mangrove primer maupun sekunder semakin menurun sejak tahun 2013-2015, tetapi pada periode 2016-2017 terjadi peningkatan luasan lahan mangrove di Indonesia (SLHI 2017). Peningkatan luasan mangrove ini didorong oleh adanya kegiatan RHL secara berkelanjutan dengan meningkatkan adanya peran serta masyarakat sekitar pantai.

2.8 Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur

Kecamatan Pasir Sakti merupakan dataran dengan ketinggian rata-rata 7,25 meter di atas permukaan laut, luas wilayah Kecamatan Pasir Sakti adalah 118.44 km². Secara geografis Pulau ini terletak pada koordinat 5°31'S - 105°49' E. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Pasir Sakti memiliki batas-batas :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gunung Pelindung dan Kecamatan Labuhan Maringgai

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jabung.

Akhir tahun 2021, wilayah administrasi Kecamatan Pasir Sakti terdiri dari 8 desa. Luas daratan masing-masing desa, yaitu : Sumur Kucing (17,60 km²), Labuhan Ratu (14,40 km²), Kedung Ringin (12,00 km²), Rejo Mulyo (17,26 km²), Purworejo (11,31 km²), Mulyosari (17,18 km²), Pasir Sakti (18,81 km²), Mekarsari (9,88 km²). Kecamatan Pasir Sakti memiliki satu buah sungai yaitu sungai Sekampung. Desa yang dilalui aliran sungai adalah Desa Sumur Kucing Desa Labuhan Ratu. Pada tahun 2021 Kecamatan Pasir Sakti terdiri dari 8 desa 57 dusun dan 254 RT, Seluruh desa di kecamatan ini berstatus pedesaan. Hutan mangrove yang terletak di Desa Purworejo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur ini memiliki 8 jenis tumbuhan dengan luas total keseluruhan mencapai 378 hektare.

Berdasarkan hasil wawancara pra survey dengan salah satu ketua penggiat mangrove, Samsudin, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Purworejo dan Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) mengatakan, kegiatan penanaman mangrove pertama kali dilakukan pada tahun 2004 oleh masyarakat sekitar dengan harapan akan muncul hutan mangrove yang dapat mencegah abrasi. Seiring berjalannya waktu mulai dari tahun 2018 dibentuk ekowisata mangrove yang dikelola oleh masyarakat sekitar. Bagi pengunjung yang ingin menginap disediakan rumah penginapan dengan jumlah 10 unit dan Untuk *rate* harganya berkisar mulai dari Rp 250.000 untuk kamar AC dan Non AC Rp 150.000.

2.9 Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Peneliti harus mempelajari penelitian terdahulu yang sejenis untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Kajian penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Kajian penelitian terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	(Alsusanti, 2021)	Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Ekowisata Alam Berembang Bertuah di Kampung Suak Merambai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak	Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Ekowisata Alam Berembang Bertuah dan faktor yang menghambat partisipasi masyarakat yang terdiri dari empat dimensi. Metode Penelitian yaitu metode kuantitatif deskriptif. Berdasarkan penelitian menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Ekowisata Alam lokasi tersebut termasuk dalam kategori sedang dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi.
2	(Manurung, 2010)	Peran Serta Masyarakat Terhadap Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Di Desa Bagan Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai,	Peran serta masyarakat dalam perencanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk dalam kategori tingkat peran serta sedang dengan skor rata-rata 49,53%. Untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk dalam kategori sedang dengan skor rata-rata 60,66%. Peran serta masyarakat dalam kegiatan evaluasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk dalam kategori sedang yaitu dengan skor rata-rata 55,49%.
3	(Surayya, 2020)	Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Rehabilitasi Mangrove di Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu	Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat merupakan aktor penting untuk peningkatan partisipasi masyarakat. Kriteria yang menjadi prioritas dalam peningkatan partisipasi masyarakat adalah aspek ekonomi. Strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi mangrove yaitu dengan cara melakukan peningkatan intensitas kegiatan dan pendanaan sarana rehabilitasi, peningkatan pendidikan melalui pendidikan formal dan nonformal.

Tabel 2. Lanjutan

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
4	(Widiyastuti et al, 2019)	Persepsi Petani Terhadap Pengembangan System Of Rice Intensification (Sri) Di Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang	Berdasarkan hasil analisis Rank Spearman dan uji t, terdapat hubungan sangat signifikan antara pendidikan nonformal dengan persepsi petani terhadap pengembangan SRI. Terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan sosial dengan persepsi petani terhadap pengembangan SRI. Terdapat hubungan yang tidak signifikan antara umur, pendidikan formal, pengalaman berusahatani, luas lahan, dan keterpaan media massa dengan persepsi petani terhadap pengembangan SRI
5	(Alfandi, 2019)	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Mangrove	Partisipasi kelompok PAPELING tergolong dalam partisipasi terapi dan pasif. Anggota kelompok hanya dilibatkan ketika ada kegiatan pembibitan dan hanya sebagai pekerja. Peran pemerintah yang masih <i>top down</i> mengakibatkan masyarakat terbatas ruang gerak dalam pengelolaan mangrove dan pada saat menyampaikan aspirasi.
6	(Yuliani & Herminasari, 2017)	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan mangrove di Desa Segarajaya masih perlu ditingkatkan, terutama dari aspek keterlibatan masyarakat dalam perawatan bibit mangrove yang sudah ditanam. Hal itu dilihat dari masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam hal merawat dan mengevaluasi program yang sudah dilakukan.
7	(Sutrisno, 2015)	Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengembangan Tanaman Mangrove di Kabupaten Pati	Hasil penelitian menunjukkan: (1) Peranan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengembangan tanaman mangrove memperoleh skor rata-rata 49,94 termasuk kategori cukup, (2) Partisipasi masyarakat dalam pengembangan tanaman mangrove memperoleh skor rata-rata 41,81 termasuk kategori cukup.

Tabel 2. Lanjutan

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
8	(Desmania et al, 2018)	Partisipasi Kelompok Wanita Cinta Bahari dalam Upaya Konservasi Hutan Mangrove	Tujuan Penelitian ini yaitu mengidentifikasi kegiatan yang dilakukan kelompok wanita cinta bahari dalam upaya konservasi hutan mangrove. Upaya konservasi terdiri atas perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya hutannya. Berdasarkan hasil penelitian, aspek perlindungan dalam upaya konservasi hutan mangrove masuk kategori tinggi yaitu sebesar 88%. Aspek pemanfaatan masuk kategori baik dengan persentase sebesar 58% yang didukung oleh kegiatan pemanfaatan hutan mangrove sebagai bahan olahan makanan, minuman dan obat-obatan.
9	(Listiana et al, 2021)	Pelayanan & Manfaat Koperasi Serta Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Anggota (Studi Kasus Pada Koperasi Jurai Siwo Ragem Kota Metro	Partisipasi anggota juga dapat diartikan sebagai keikutsertaan anggota dalam berbagai bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh koperasi, baik kedudukan anggota sebagai pemilik maupun sebagai pengguna/pelanggan. Keikutsertaan anggota ini diwujudkan dalam bentuk pencurahan pendapat dan pikiran dalam pengambilan keputusan, dalam pengawasan, kehadiran dan keaktifan dalam rapat anggota, pemberian kontribusi modal keuangan, serta pemanfaatan pelayanan yang diberikan oleh koperasi
10	(Fatimatuzza roh et al, 2021)	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Analisis Aktor Pada Rehabilitasi Mangrove di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi mangrove di Karangsong berada pada tahap <i>citizen power</i> . Fase ini menunjukkan bahwa masyarakat mampu merencanakan dan membuat kebijakan rehabilitasi mangrove. Partisipasi masyarakat yang berkelanjutan masih diperlukan dalam pengelolaan mangrove. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah diharapkan tetap memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan rehabilitasi mangrove agar berkelanjutan.

Tabel 3. Lanjutan

11	(Kusuma et al, 2022)	Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa, di Desa Cangu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Cangu masih belum maksimal. Faktor-faktor yang belum maksimal di Desa Cangu disebabkan oleh kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Dampak yang diperoleh dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa belum maksimal yaitu hasil yang diperoleh dalam pembangunan belum optimal dan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa Cangu.
12	(Nurmayasari et al., 2020)	Partisipasi dan Kepuasan Petani Terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian di Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan	Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan pertanian di Kecamatan Palas berada pada tingkat yang cukup tinggi. Secara umum kepuasan petani terhadap kinerja penyuluhan adalah cukup puas. Dari sembilan indikator, kepuasan petani terhadap gerakan massal di wilayah kerja mereka adalah yang paling rendah. Petani menilai puas terhadap cara komunikasi penyuluh pertanian. Petani puas dengan cara komunikasi penyuluh dan menilai kegiatan penyuluhan berdampak baik pada kegiatan penyuluhan pertanian.
13	(Viantimala et al., 2020)	Kinerja Penyuluh dan Partisipasi Petani Dalam Kegiatan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah	Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kinerja penyuluh pertanian sebagai fasilitator di Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah baik. Penyuluh telah membantu anggota poktan untuk kerjasama dengan lembaga pemerintah atau dinas pertanian, membantu kelompok melakukan kerjasama dengan kelompok tani lain, dan membantu kelompok dalam menyusun program kerja dan rancangan peningkatan kualitas dalam pertanian.. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti program penyuluhan pertanian yang diadakan oleh penyuluh pertanian meliputi beberapa kegiatan seperti : aktif dalam keolmpok tani, petani bergabung dalam kelompok tani, petani memberi saran pembangunan kelompok tani, dan petani mengusulkan kegiatan penyuluhan

Tabel 3. Lanjutan

14	(Podungge et al., 2020)	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan Mangrove	Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove di Desa Langge Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Analisis data yang digunakan adalah skala likert. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Partisipasi masyarakat yang terbagi atas 4 indikator diantaranya meliputi partisipasi penanaman, partisipasi pemanfaatan hutan mangrove, partisipasi pelestarian, serta partisipasi kegiatan penyuluhan dan pelatihan.
15	(Listiana et al., 2020)	Respons Petani Terhadap Penggunaan Combine Harvester Pada Waktu Panen Padi Sawah Di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung	Hasil kajian menunjukkan bahwa respons petani terhadap combine harvester cukup responsif. Respons petani berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan dan tingkat kekosmopolitan, dan jumlah tanggungan keluarga yang sedikit. Upaya peningkatan respons petani terhadap penggunaan combine harvester dapat dilakukan dengan meningkatkan pendidikan petani baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, meningkatkan kekosmopolitanan petani dengan cara penyuluh aktif mengajak petani untuk mencari informasi, dan bermitra dengan stakeholder di luar sistem sosialnya
16	(Setiawan & Purwanti, 2017)	Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (RHL) di Kabupaten Bone Bolango	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Skor capaian untuk variabel partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan adalah sebesar 79,69% yang berada pada kategori yang cukup baik. Hasil setiap indikator diperoleh bahwa indikator voice dan kontrol berada pada kategori yang cukup baik, sementara indikator akses berada dalam kategori yang baik. (2) Strategi dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan berada pada kuadran 3 yakni strategi <i>Turn Around</i> . Strategi ini menekankan pada pemanfaatan berbagai peluang untuk mengubah kelemahan masyarakat dalam mengoptimalkan perannya dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Tabel 3. Lanjutan

17	(Putra & Suryawan, 2018)	Partisipasi Masyarakat Desa Jungutbatu di Daya Tarik Wisata Mangrove Tour, Nusa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung	Kesimpulannya adalah terdapat tiga tahapan partisipasi, yaitu : Pada tahap perintisan potensi wisata pada hutan mangrove baru ditemukan sehingga masih belum banyak wisatawan yang mengetahui tentang kegiatan wisata di hutan mangrove. Pada tahap pengembangan masyarakat mulai mengembangkan potensi dalam hutan mangrove untuk dijadikan daya tarik wisata. Pada tahap pelestarian masyarakat yang sadar akan kelestarian lingkungan melakukan pengawasan, pelestarian dan penjagaan terhadap hutan mangrove serta memberikan sanksi kepada pelanggar.
18	(Ramadani & Mayarni, 2021)	Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kepariwisataaan Kelurahan Agrowisata di Kota Pekanbaru	Hasil penelitian menunjukkan pada tahapan pengambilan keputusan telah melibatkan kalangan masyarakat dalam kegiatan musyawarah kelurahan, implementasi yang dilakukan dalam pengembangan sudah berjalan baik, serta manfaat dari hasil kegiatan yang dilakukan telah berdampak kepada pembangunan di wilayah Kelurahan Agrowisata namun manfaat dari pengelolaan wisata tersebut belum dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, adapun faktor penghambatnya yaitu sumber daya manusia (SDM), dana yang terbatas dan pandemi covid-19.
19	(Ramadhani et al., 2020)	Partisipasi Anggota Kelompok Tani dalam Program Upsus Pajale di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat partisipasi anggota poktan dalam perencanaan kegiatan sebagian besar tergolong sedang (53,56%), partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian besar tergolong tinggi (53,33%), partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan tergolong tinggi (62,22%), dan partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan tergolong sedang (53,33%). Secara keseluruhan sebagian besar partisipasi anggota poktan dalam Program Upsus Pajale tergolong tinggi (53,33%). Faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat partisipasi petani dalam program Upsus Pajale, yaitu motivasi, tingkat pengetahuan, dan persepsi petani.

Tabel 3. Lanjutan

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
20	(Musoleha et al., 2014)	Persepsi Masyarakat Terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PBKL) PTPN VII Unit Usaha Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan PKBL PTPN VII Unit Usaha Rejosari, mengetahui persepsi masyarakat dan manajemen perusahaan terhadap PKBL PTPN VII Unit Usaha Rejosari, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat sekitar perusahaan terhadap PKBL PTPN VII Unit Usaha Rejosari..
21	(Viantimala et al, 2020)	Kinerja Penyuluh dan Partisipasi Petani Dalam Kegiatan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah	Kinerja penyuluh pertanian sebagai fasilitator di Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah baik. Penyuluh telah membantu anggota poktan untuk mendapatkan saprotan yang baik, mendapatkan modal, membantu anggota untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh lembaga pemerintah/swasta, dll. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti program penyuluhan pertanian yang diadakan oleh penyuluh pertanian meliputi beberapa kegiatan seperti : aktif dalam keolmpok tani, petani bergabung dalam kelompok tani, petani memberi saran pembangunan kelompok tani, dan petani mengusulkan kegiatan penyuluhan.

2.10 Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara agraris dengan sumber daya alam yang melimpah, namun hal ini juga diiringi oleh pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Kawasan Hutan Mangrove memiliki potensi sumber daya alam yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal, bijaksana, dan berkelanjutan. Pelestarian hutan mangrove dalam upaya mendukung pengembangan wilayah harus memperhatikan tiga aspek keberlanjutan, yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan atau ekologi. Ketidakserasian dalam pengelolaan ketiga aspek keberlanjutan tersebut dapat berdampak negatif terhadap salah satu aspek. Kondisi hutan mangrove

sampai saat ini masih mengalami kerusakan akibat pemanfaatan dan pelestarian yang kurang memperhatikan aspek kelestarian.

Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur merupakan wilayah yang memiliki kawasan hutan mangrove yang cukup luas dan berpotensi besar untuk pengembangan dan pelestarian hutan mangrove. Namun keadaan dilapangan menunjukkan bahwa masih tingginya kerusakan hutan mangrove yang disebabkan adanya pembukaan tambak secara illegal. Kegiatan konversi lahan mangrove menjadi tambak dan pemukiman yang dilakukan masyarakat menyebabkan berkurangnya ekosistem hutan mangrove. Kegiatan konversi lahan mangrove yang dilakukan masyarakat cenderung mengabaikan aspek kelestarian sumberdaya mangrove, sehingga menyebabkan rusaknya ekosistem mangrove. Masalah lingkungan pun timbul, seperti terjadinya abrasi, meluasnya intrusi air laut, terjadinya pencemaran air bahkan banjir. Sejalan dengan pendapat (Lembaga Penelitian UNILA, 2010), bahwa lebih dari 50% kerusakan hutan mangrove telah terjadi di pesisir Timur Lampung disebabkan oleh konversi lahan, pencemaran pantai, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan mangrove sebagai penyangga kehidupan darat dan lautan.

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove menjadi salah satu faktor terjadinya kerusakan hutan mangrove berkelanjutan. Masyarakat setempat bersikap acuh tak acuh dalam memahami dan mengelola pentingnya hutan mangrove dalam menjaga lingkungan, perlindungan dari bencana alam, dan penopang mata pencaharian masyarakat sekitar. Semua masalah ini mengancam keberlanjutan ekosistem mangrove, yang memiliki nilai ekologis, ekonomis, dan sosial yang besar. Oleh karena itu, perlindungan dan pelestarian hutan mangrove sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut, melindungi pesisir dari erosi, dan mendukung mata pencaharian masyarakat lokal. Keberhasilan pengelolaan ekosistem hutan mangrove ditentukan oleh keterlibatan masyarakat yang bermukim di daerah pantai sebagai mitra dalam pengelolaan sumber daya alam pantainya khususnya hutan mangrove

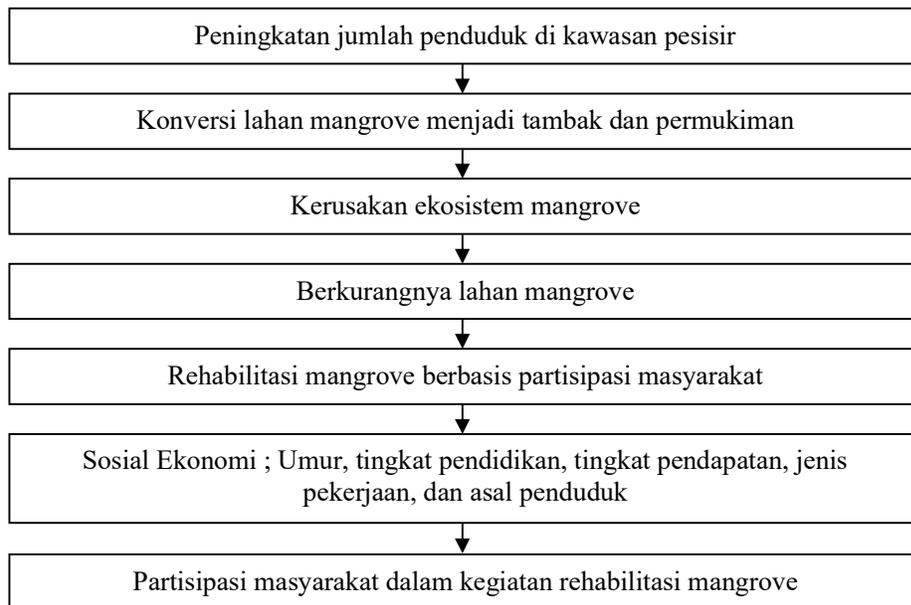
(Melana & Courtney, 2000). Kegiatan rehabilitasi mangrove berbasis partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Kecamatan Pasir Sakti.

Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) sebagai sebuah gerakan nasional untuk memulihkan kelestarian ekologi sumber daya hutan dan menyejahterakan masyarakat yang tinggal di sekitar dan dalam hutan memiliki beberapa acuan sumber hukum yang melingkupinya. Berdasarkan aspek yuridis kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan mengacu pada TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam terkait tujuan penyelenggaraan rehabilitasi untuk melestarikan sumber daya alam dan menyejahterakan masyarakat. Sementara untuk aturan perundangan kegiatan RHL berpatokan pada UU. No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang untuk menghindari tumpang tindih kawasan peruntukan. Untuk tujuan kelestarian lingkungan dan biodiversity kegiatan rehabilitasi juga mengacu pada UU. No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, sedangkan sebagai payung hukum utama untuk penyelenggaraan program rehabilitasi kegiatan berpangkal pada UU. No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Wibowo, 2016).

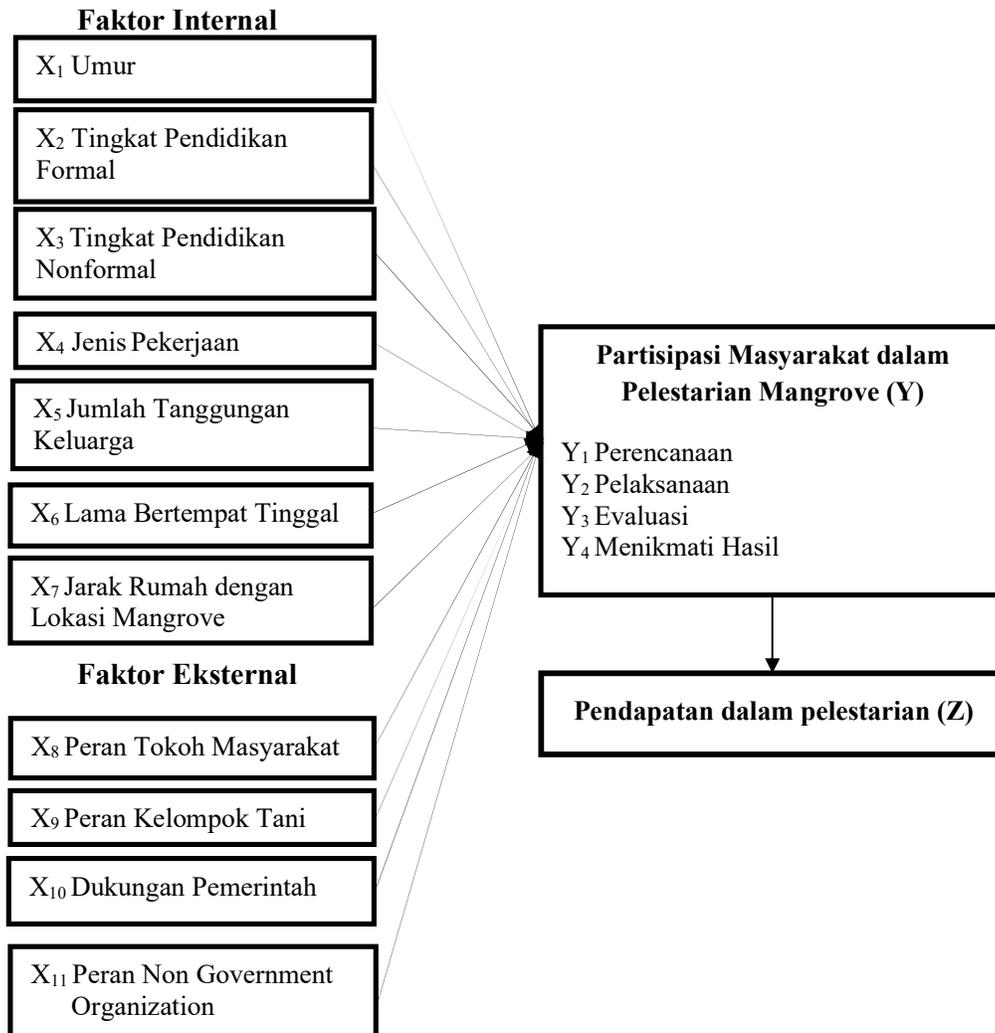
Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan menjadi sangat penting artinya dalam menanggulangi permasalahan kerusakan lingkungan. Agar kegiatan hutan dan lahan tepat pada sarannya, satuan unit pengelolaan kegiatan RHL harus dibuat dalam satu satuan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara utuh yang merupakan satu kesatuan ekosistem. Dengan demikian, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan bukan lagi merupakan kegiatan parsial tapi merupakan kegiatan terpadu baik dalam cakupan wilayah maupun dalam cakupan inter-sektoral. Dalam hal pelestarian sumber daya hutan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, peran masyarakat merupakan faktor dominan dimana kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan berjalan secara berkelanjutan (Wibowo, 2016). Upaya rehabilitasi hutan mangrove dapat dilaksanakan baik pada kawasan yang telah dikuasai oleh masyarakat maupun pada kawasan yang tidak dikuasai oleh masyarakat dapat berjalan

sesuai yang diinginkan, hal tersebut dapat didukung dengan melibatkan unsur masyarakat sekitar kawasan pesisir dan instansi pemerintah terkait (Alwidakdo, 2014). Bila ditinjau secara menyeluruh perambahan atau pemanfaatan hutan dapat diakiabatkan beberapa hal yang berikut ini antara lain: faktor sosial ekonomi, tingkat pendidikan, kesadaran, perilaku di suatu kawasan hutan.

Kegiatan rehabilitasi mangrove perlu memperhatikan kondisi ekologi, kondisi ekonomi dan sosial, serta keterlibatan masyarakat (Tuheteru & Mahfudz, 2012). Oleh karena itu, kegiatan rehabilitasi mangrove dalam penelitian ini juga mencakup aspek ekologi, dan sosial-ekonomi. Aspek ekologi berdasarkan pada indeks nilai penting spesies mangrove, keragaman, kekayaan, dan pemerataan jenis mangrove. Aspek sosial-ekonomi berdasarkan umur, tingkat pendidikan, jenis mata pencaharian, tingkat pendapatan, dan asal penduduk. Kedua aspek tersebut diduga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi mangrove. *Output* dalam penelitian ini adalah perumusan strategi peningkatan partisipasi terhadap kegiatan rehabilitasi mangrove. Kondisi ekologi, dan sosial-ekonomi akan menjadi informasi dasar dalam perumusan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi mangrove. Dasar pemikiran penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 1. Kerangka pikir penelitian



Gambar 2. Paradigma hubungan antar variabel penelitian

2.11 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dibuat, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga umur berhubungan terhadap partisipasi masyarakat dalam pelestarian mangrove di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti.
2. Diduga tingkat pendidikan formal berhubungan terhadap partisipasi masyarakat dalam pelestarian mangrove di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti.

3. Diduga tingkat pendidikan nonformal berhubungan terhadap partisipasi masyarakat dalam pelestarian mangrove di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti.
4. Diduga pekerjaan berhubungan terhadap partisipasi masyarakat dalam program pelestarian mangrove di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti.
5. Diduga jumlah tanggungan keluarga berhubungan terhadap partisipasi masyarakat dalam program pelestarian mangrove di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti.
6. Diduga lama tinggal berhubungan terhadap partisipasi masyarakat dalam program pelestarian mangrove di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti.
7. Diduga jarak rumah berhubungan terhadap partisipasi masyarakat dalam program pelestarian mangrove di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti.
8. Diduga peran tokoh masyarakat berhubungan terhadap partisipasi masyarakat dalam program pelestarian mangrove di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti.
9. Diduga peran kelompok tani berhubungan terhadap keberlanjutan pelestarian mangrove di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti.
10. Diduga dukungan pemerintah berhubungan terhadap partisipasi masyarakat dalam pelestarian mangrove di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti.
11. Diduga peran *non government organization* berhubungan terhadap partisipasi masyarakat dalam pelestarian mangrove di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti.
12. Diduga partisipasi masyarakat berhubungan terhadap pendapatan dalam pelestarian mangrove.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel adalah pengertian atau definisi konsep/konsep dasar. Konsep dasar dan definisi operasional disusun secara operasional, secara spesifik dan nyata dalam lingkup objek penelitian/objek yang diteliti. Masing-masing variabel perlu diberi batasan dan dioperasionalkan agar variabel-variabel yang telah ditetapkan dalam penelitian ini dapat diukur. Sehingga dapat diketahui dengan jelas indikator pengukurannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Berikut penguraian tentang klasifikasi variabel-variabel yang diteliti.

Pengklasifikasian variabel X, Y, dan Z dimasukkan ke dalam tiga kelas yaitu, skor tiga untuk tinggi, skor dua untuk sedang, dan skor satu untuk rendah, dengan menggunakan rumus Struges (Dajan, 1986). Pengukuran variabel X, Y, dan Z diukur berdasarkan kuesioner yang ditanyakan pada responden. Skor yang diperoleh diubah menjadi data interval untuk dideskripsikan dan selanjutnya digunakan dalam analisis korelasi *Rank Spearman*.

3.1.1 Variabel X

Pada penelitian ini, faktor-faktor internal dan eksternal yang berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi hutan mangrove didefinisikan sebagai variabel X. Faktor internal yang terdiri umur (X_1), tingkat pendidikan formal (X_2), pekerjaan utama (X_3), jumlah tanggungan keluarga (X_4), lama bertempat tinggal (X_5) dan jarak rumah dengan lokasi mangrove (X_6).

Sedangkan faktor eksternal terdiri dari peran tokoh masyarakat (X_7), peran kelompok tani (X_8), dan dukungan pemerintah (X_9), dan peran *Non Government Organization* (X_{10}). Pengukuran dan definisi operasional variabel X faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi hutan mangrove dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengukuran variabel (X) faktor-faktor internal dan eksternal

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Kategori
Umur (X_1)	Umur responden dari awal kelahiran sampai penelitian dilaksanakan diukur dengan satuan tahun.	1. ≤ 14 tahun 2. 15 – 64 tahun 3. ≥ 65 tahun	Belum Produktif Produktif Non Produktif
Pendidikan Formal (X_2)	Jenjang pendidikan formal yang telah diikuti responden sampai dengan penelitian dilakukan.	1. SD 2. SMP-SMA 3. Perguruan Tinggi	Rendah Sedang Tinggi
Pendidikan Nonformal (X_3)	Segenap pendidikan atau pelatihan yang diberikan kepada masyarakat dalam satu tahun terakhir.	Frekuensi kegiatan pembelajaran pelatihan, sosialisasi, lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pelestarian mangrove dalam 1 tahun terakhir.	Sering Pernah Tidak pernah
Jenis Pekerjaan Utama (X_4)	Jenis pekerjaan yang dikerjakan, baik itu yang dikerjakan di dalam rumah maupun di luar rumah. Pekerjaan yang dikerjakan oleh responden disaat penelitian.	1. Swasta dan PNS 2. Wirausaha (Pedagang dll) 3. Petani, Nelayan	Rendah Sedang Tinggi

Tabel 4. Lanjutan

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Kategori
Jumlah tanggungan keluarga (X_5)	Jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan kepala keluarga. Anggota keluarga yang masih tinggal dalam satu rumah selain narasumber yang ditanggung responden yang didapatkan dari penjelasan responden.	Banyaknya tanggungan 1. ≤ 3 orang 2. 4 – 5 orang 3. ≥ 6 orang	Sedikit Sedang Banyak
Lama Tinggal (X_6)	Rentang waktu yang telah dilalui responden dalam kurun waktu tertentu selama tinggal di wilayah penelitian sampai dengan penelitian dilakukan.	Lama bertempat tinggal : 1. 11 – 27 Tahun 2. 28 – 44 Tahun 3. 45 – 60 Tahun	Baru Sedang Lama
Jarak Rumah (X_7)	Rentang jarak tempat tinggal masyarakat dengan lokasi penelitian. Diukur jarak tempuh dari daerah lokasi penelitian ke lokasi rumah dalam satuan km.	Jarak Rumah ke hutan mangrove : 1. < 3 Km 2. 3 Km – 5 km 3. > 5 Km	Tidak jauh Jauh Sangat jauh
Peran Tokoh Masyarakat (X_8)	Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penggerak atau motivator dalam keberlanjutan program RHL. Memfasilitasi Masyarakat.	Berdasarkan tugas tokoh masyarakat dalam : 1. Pemantauan RHL 2. Ajakan warga setempat untuk mengikuti program RHL dan melaksanakan program RHL 3. Pemberian informasi terkait program RHL dari warga setempat 4. Dukungan dalam melaksanakan program RHL 5. Pemberian reward/punishment bagi pelaku RHL 6. Kepercayaan dan pemberian contoh dari <i>local champion</i>	Rendah Sedang Tinggi

Tabel 4. Lanjutan

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Kategori
Peran Kelompok Tani (X_9)	Ekspektasi peran dari fungsi kelompok tani. Menurut konsepsi Kementerian pertanian fungsi kelompok tani terdiri dari kelas belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi.	<p style="text-align: center;">Wahana belajar dan berorganisasi</p> 1. Kelompok tani terlibat dalam kegiatan pembibitan pelestarian hutan mangrove. 2. Kelompok tani memberikan informasi mengenai pelestarian hutan mangrove.	Rendah Sedang Tinggi
		<p style="text-align: center;">Wahana kerjasama</p> 3. Kelompok tani membentuk kerjasama antar poktan dalam kegiatan pelestarian hutan mangrove. 4. Kelompok tani membantu menyediakan sarana dan prasarana produksi dengan bekerjasama dengan pihak lain.	Rendah Sedang Tinggi
		<p style="text-align: center;">Unit Produksi</p> 5. Adanya bantuan dari poktan dalam pengelolaan hasil produksi. 6. Kelompok tani membantu dalam penjualan dan pemasaran hasil produksi.	Rendah Sedang Tinggi
Dukungan Pemerintah (X_{10})	Segala bentuk dukungan baik dalam hal kebijakan maupun alokasi anggaran. Pendampingan pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, hingga desa.	Berdasarkan dukungan dalam : 1. Peraturan/kebijakan. 2. Pendanaan. 3. Pendampingan/Penyuluhan. 4. <i>Reward/Punishment</i> dari pemerintah dalam pelaksanaan program RHL	Rendah Sedang Tinggi
Non - Government Organization (X_{11})	Keterlibatan NGO dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pelestarian hutan mangrove.	Berdasarkan dukungan dalam : 1. Sumbangan pemikiran 2. Bantuan pengelolaan 3. Mendampingi masyarakat 4. Keterlibatan pada perencanaan 5. Keterlibatan dalam Pelaksanaan 6. Keterlibatan dalam evaluasi	Rendah Sedang Tinggi

3.1.2 Variabel Y

Variabel partisipasi masyarakat dalam pelestarian mangrove (Y) merupakan merupakan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian mangrove. Indikator yang

dinilai yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap menikmati hasil. Partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi hutan mangrove (Y) merupakan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan hutan mangrove, terdapat empat aspek utama yang meliputi perencanaan (Y1), pelaksanaan (Y2), evaluasi (Y3), dan tahap menikmati hasil (Y4). Pengukuran dan definisi operasional variabel Y partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Pengukuran variabel (Y) tingkat partisipasi masyarakat

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Kategori
Perencanaan (Y ₁)	Keikutsertaan masyarakat dalam memberikan usulan pemikiran dan tenaga, waktu dalam penyusunan perencanaan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengajukan usulan atau saran terkait kerja bakti dan penanaman mangrove b. Proses pengambilan keputusan untuk melestarikan hutan mangrove c. Mempunyai ide mengenai perjanjian didalam masyarakat untuk menjaga mangrove d. Mengajukan rencana tentang program pelestarian hutan mangrove. 	Rendah Sedang Tinggi
Pelaksanaan (Y ₂)	Keikutsertaan masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran dan tenaga, waktu dalam pelaksanaan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Sumbangan berupa waktu, tenaga, uang atau barang b. Keikutsertaan dalam penyemaian, dan pembenihan. c. Ikut pertemuan dan program tentang upaya pelestarian mangrove d. Membersihkan wilayah hutan mangrove e. Mengikuti kegiatan penanaman mangrove f. Menjaga kebersihan di kawasan hutan mangrove 	Rendah Sedang Tinggi
Evaluasi (Y ₃)	Keikutsertaan petani dalam monitoring dan evaluasi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengajak masyarakat untuk ikut melestarikan hutan mangrove b. Menegur orang yang membuang sampah sembarangan c. Memperbaiki pohon mangrove yang miring d. Membersihkan wilayah hutan mangrove e. Menanam kembali mangrove yang mati dan mengawasi pelanggaran terhadap kerusakan mangrove 	Rendah Sedang Tinggi

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Kategori
Menikmati Hasil (Y ₄)	Penerimaan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setelah adanya kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan dari hutan mangrove	Manfaat yang diterima oleh masyarakat berupa hasil tangkapan ikan dan udang, penanggulangan bencana (intensitas banjir), dan stabilisator kondisi pantai.	Rendah Sedang Tinggi

3.1.3 Variabel Z

Pendapatan melalui pelestarian hutan mangrove (Z) merupakan pendapatan hasil kerja yang telah dicapai oleh masyarakat melalui pelestarian hutan mangrove.

Pendapatan dari kegiatan agroindustri atau keuntungan merupakan selisih antara penerimaan dengan biaya produksi yang diklasifikasikan berdasarkan hasil pendapatan yang didapatkan masyarakat melalui pemanfaatan hutan dari hasil pelestarian hutan. Pengukuran dan definisi operasional variabel Z pendapatan masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Pengukuran dan definisi operasional variabel Z pendapatan masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Kategori
Pendapatan dari pelestarian (Z)	Besaran pendapatan yang didapatkan masyarakat dalam keikutsertaan pelestarian mangrove. Pendapatan didapatkan dari pemanfaatan hutan mangrove yang diukur dalam satuan rupiah dalam satu tahun.	Berdasarkan dukungan dalam : 1. Budidaya bibit mangrove 2. Pemanfaatan biota laut 3. Pemanfaatan Hutan a. Pemanfaatan madu hutan b. Pengolaan tanaman mangrove menjadi obat – obatan dan bahan makanan	Rendah Sedang Tinggi

3.2 Lokasi Penelitian, Responden, dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti merupakan daerah pesisir yang memiliki potensi pengelolaan dan budidaya mangrove yang besar di Provinsi Lampung. Populasi penelitian ini sebanyak 152 orang, sampel sebanyak 61 orang yang ditentukan merujuk pada rumus Slovin (Priyono, 2008). Responden penelitian ini adalah masyarakat pesisir yang tinggal di Dusun IV Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur baik yang tergabung ke dalam anggota Kelompok Tani Hutan Mutiara Hijau I ataupun yang tidak tergabung. Desa Purworejo tersebut berbatasan langsung dengan Desa Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur dan Desa Bandar Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Penentuan sampel dalam penelitian ini merujuk rumus Slovin dalam Priyono (2008) dengan rumus:

$$n = \frac{N}{Ne^2 + 1}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel (orang)
 N = Jumlah populasi (orang)
 e^2 = Nilai kritis (batas ketelitian) ditetapkan sebesar 10% (0,1).

Jumlah sampel yang didapatkan berdasarkan rumus tersebut adalah:

$$n = \frac{152}{152 (0,1)^2 + 1} = 60,31$$

Berdasarkan perhitungan diperoleh jumlah sampel penelitian yang diambil sebanyak 61 orang.

3.3 Metode Pengumpulan Data dan Jenis Data

Pengumpulan data dilaksanakan dengan metode survey (Singarimbun & Efendi, 1995) yaitu penelitian yang mengambil sampel menggunakan

kuesioner sebagai pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer, yaitu :

1. Wawancara, merupakan cara untuk memperoleh data dan informasi dari seseorang atau subjek yang diteliti. Data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara meliputi data pribadi responden dan hal lainnya yang berkaitan dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. Wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner. Wawancara dilakukan terhadap masyarakat yang terlibat dalam pelestarian mangrove dan mendapatkan manfaat dari ekowisata mangrove.
2. Observasi atau pengamatan langsung, dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang kejadian nyata dalam lokasi penelitian.

Data sekunder diperoleh melalui metode pencatatan data yang berasal dari lembaga atau instansi yang berkaitan dengan penelitian seperti Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Lampung Mangrove Center (LMC), literatur lainnya dan laporan-laporan serta jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

3.4 Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dan statistik non parametrik. Analisis data pada penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah dan menguji hipotesis yang dirumuskan. Metode analisis data yang digunakan berfungsi mendeskripsikan variabel-variabel yang diteliti dan memberikan interpretasi sesuai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Selanjutnya seluruh data yang terkumpul ditabulasi berdasarkan kategori masing-masing dan dilakukan analisis statistika. Metode analisis data yang digunakan yakni analisis deskriptif dan analisis *Rank Spearman*.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti (Sugiyono, 2016). Data yang dideskripsikan berasal dari hasil wawancara terhadap responden yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal (X), partisipasi (Y) dan pendapatan (Z) ditabulasi dan dikelompokkan berdasarkan kriteria. Upaya penyajian ini dimaksudkan mengungkapkan informasi penting yang terdapat dalam data ke dalam bentuk yang lebih ringkas dan sederhana yang pada akhirnya mengarah pada keperluan adanya penjelasan dan penafsiran. Analisis statistik deskriptif dilaksanakan melalui beberapa tahapan:

- a) Penyajian data variabel X dan Y dengan metode tabulasi
- b) Penentuan kecenderungan nilai responden untuk masing-masing variabel yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelas kriteria masing-masing adalah: (1) rendah, (2) sedang, dan (3) tinggi. Interval kelas ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Interval kelas} = \frac{\text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}{\text{klasifikasi}}$$

2. Rank Spearman

Tujuan ketiga menggunakan inferensial dengan pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan statistik nonparametrik uji korelasi *Rank Spearman* (Siegel, 2005). Pada penelitian ini digunakan uji korelasi *Rank Spearman* karena skala pengukuran data yang digunakan adalah skala ordinal dan rasio, serta jenis hipotesis yang digunakan yaitu hipotesis korelasi yang meramalkan derajat hubungan antara dua variabel. Menurut Siegel (2005), rumus *Rank Spearman* yang digunakan yaitu :

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n^3}$$

Keterangan:

- r_s : Koefisien korelasi Spearman
 di : Perbedaan setiap pasangan rank
 n : Jumlah sampel penelitian (orang)

Rumus r_s ini digunakan atas dasar pertimbangan bahwa dalam penelitian ini akan melihat korelasi (keeratn hubungan) antar dua peubah, yaitu X dan Y dari peringkat dan dibagi dalam klasifikasi tertentu. Hal ini sesuai dengan fungsi r_s yang merupakan ukuran asosiasi dua peubah yang berhubungan, diukur sekurang-kurangnya dengan skala ordinal (berurut), sehingga objek atau individu yang dipelajari dapat diberi peringkat dalam dua rangkaian yang berurutan. Jika terdapat peringkat yang berangka sama dalam variabel X maupun Y, maka memerlukan faktor koreksi T Siegel (2005) dengan rumus sebagai berikut:

$$r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum di^2}{2\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}}$$

$$\sum x^2 = \frac{n^3 - n}{12} - \sum Tx$$

$$\sum y^2 = \frac{n^3 - n}{12} - \sum Ty$$

$$\sum T = \frac{t^3 - t}{12}$$

Keterangan:

n = Jumlah responden (orang)

t = Banyak observasi yang berangka sama pada suatu peringkat

T = Faktor koreksi

$\sum x^2$ = Jumlah kuadrat variabel bebas yang dikoreksi

$\sum y^2$ = Jumlah kuadrat variabel terikat yang dikoreksi

$\sum Tx^2$ = Jumlah faktor koreksi variabel bebas

$\sum Ty^2$ = Jumlah faktor koreksi variabel terikat

Kaidah pengambilan keputusan yaitu:

1. Jika $p \leq \alpha$ H_0 diterima, pada $\alpha = 0,05$ berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel yang diuji.
2. Jika $p > \alpha$ maka H_0 ditolak, pada $\alpha = 0,05$ berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel yang diuji.

Korelasi dapat diartikan sebagai hubungan dua variabel yang terjadi karena sebab akibat. Korelasi sederhana merupakan teknik yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. Analisis korelasi *rank spearman* juga dapat dilihat dari tingkat keeratan hubungan yang dibagi menjadi lima seperti Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Tingkat keeratan variabel bebas dan variabel terikat

Kategori	Nilai Rentang
Sangat rendah	0,00 – 0,199
Rendah	0,20 – 0,399
Sedang	0,40 – 0,599
Kuat	0,60 – 0,699
Sangat kuat	0,80 – 1,000

Sumber : Notoatmodjo, 2018.

Tabel 7 menunjukkan kategori keeratan hubungan yang diklasifikasikan dalam lima kategori yaitu sangat rendah, rendah, sedang, kuat dan sangat kuat. Keeratan hubungan dalam Uji *Rank Spearman* mencerminkan derajat sejauh mana dua variabel berkorelasi dan apakah hubungan tersebut positif atau negatif. Keeratan mengacu pada sejauh mana perubahan dalam satu variabel berhubungan dengan perubahan dalam variabel lainnya. Jika hubungan antara dua variabel sangat erat, perubahan dalam satu variabel akan selalu berhubungan dengan perubahan yang konsisten dalam variabel lain, baik naik atau turun, sehingga nilai koefisien Spearman menjadi mendekati +1. Sebaliknya, jika hubungan antara dua variabel lemah atau tidak ada hubungan, maka nilai koefisien Spearman mendekati 0.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan melestarikan hutan mangrove melibatkan proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi berada dalam kategori sedang, serta pemanfaatan hasil berada dalam kategori tinggi.
2. Faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam melestarikan hutan mangrove di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur adalah tingkat pendidikan non-formal, jenis pekerjaan, jumlah tanggungan keluarga, lama bertempat tinggal, jarak rumah dengan lokasi mangrove, peran tokoh masyarakat, peran kelompok tani, dukungan pemerintah, dan peran *non government organization*, sedangkan faktor-faktor yang tidak berhubungan adalah umur dan tingkat pendidikan.
3. Partisipasi memiliki hubungan nyata ke arah positif terhadap kontribusi pendapatan masyarakat pada pelestarian hutan mangrove di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur. Partisipasi masyarakat dalam memberikan pendapatan keluarga pada pelestarian hutan mangrove menyumbang rata-rata pendapatan paling tinggi sebesar Rp 1.284.677,- per bulan.
4. Tingkat pendapatan masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur berdasarkan jenis usahanya yaitu pemanfaatan hasil hutan pada pelestarian hutan mangrove menyumbang rata-rata pendapatan paling tinggi sebesar Rp 1.284.677,- per bulan, sedangkan jenis usaha

budidaya bibit mangrove berkontribusi terhadap pendapatan sebesar Rp 1.151.613,- per bulan dan pemanfaatan biota laut menyumbang rata-rata pendapatan paling kecil sebesar Rp 943.548,- per bulan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Perlu adanya kegiatan yang lebih banyak dengan melibatkan peran pemerintah dan masyarakat setempat seperti memberikan pelatihan, mendorong praktik berkelanjutan, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan melestarikan hutan mangrove yang melibatkan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
2. Untuk mempertahankan tingginya pemanfaatan hasil, penting untuk menjaga dan merawat kelestarian hutan mangrove agar masyarakat dapat memanfaatkan hasil tangkapan secara berkelanjutan. Hal ini membantu meningkatkan penghidupan dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya perikanan.
3. Untuk meningkatkan pendapatan yang lebih tinggi dapat dilakukan dengan cara mengelola dan mempromosikan ekowisata disekitar hutan mangrove. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan dan ekosistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. 2007. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan masyarakat*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Adisasmita, R. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Alfandi, D. 2019. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Mangrove. *Jurnal Sylva Lestari*, 7(1), 30–41.
- Alsusanti, A. 2021. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Ekowisata Alam Berembang Bertuah di Kampung Suak Merambai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 1–21.
- Alwidakdo, A. 2014. Studi Pertumbuhan Mangrove Pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai, Kertanegara. *Jurnal AGRIFOR*, 8(1).
- Amal, I., & Baharuddin, I. I. 2016. Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. *Jurnal Scientific Pinisi*, 2(1), 1–7.
- Asmawati. 2009. Tingkat Partisipasi Petani dalam Pemeliharaan Saluran Irigasi (Studi Kasus Desa Bilariase, Kecamatan Puturiase, Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan). *Skripsi*, Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Astuti, D. S. I. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pendidikan*. Perpustakaan Pelajaran. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Statistik Indonesia Tahun 2021*. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2022a. *Indonesia dalam angka 2022*. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2022b. *Kabupaten Lampung Timur Dalam Angka Tahun 2022*. BPS. Lampung Timur.
- Badan Pusat Statistik. 2022c. *Kecamatan Pasir Sakti Dalam Angka Tahun 2022*. BPS. Lampung Timur.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 2013. *Klasifikasi Umur*. BKKBN. Jakarta:

- Basrowi. 2011. *Partisipasi Dalam Pembelajaran*. Erlangga. Jakarta.
- Budiman, A. 1996. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Grasindo. Jakarta.
- Conyers, D. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Universitas Gajah Mada Press. Yogyakarta.
- Dahuri, & Rochimin. 1996. *Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta.
- Dajan, A. 1986. *Pengantar Metode Statistik II*. LP3ES. Jakarta.
- Desmania, D., Harianto, S. P., & Herwanti, S. 2018. Partisipasi Kelompok Wanita Cinta Bahari dalam Upaya Konservasi Hutan Mangrove. *Jurnal Sylva Lestari*, 6(3), 2018.
- Echols, J. M., & Shadily, H. 2000. *Kamus Inggris-Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Elisabeth, C., & Betsill, M. M. 2001. "NGO Influence in International Environmental Negotiations: A Framework for Analysis" dalam *Global Environmental Politics*. Massachusetts Institute of Technology.
- Erwiantono. 2006. Kajian Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kawasan Teluk Pangpang Banyuwangi. *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan*, 3(1), 46–54.
- Fatimatuzzaroh, F., Hadi, S. P., & Purnaweni, H. 2021. Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Analisis Aktor Pada Rehabilitasi Mangrove di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. *Jurnal Sosek KP*, 16(2), 257–269.
- Hernanto, F. 2003. *Ilmu Usahatani*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Iwang, G. 2018. Partisipasi Masyarakat Pesisir Dalam Pelestarian Ekosistem Hutan Mangrove. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(145–153).
- Jalal, F., & Supriadi, D. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Adicita Karya Nusa. Yogyakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. *Statistik Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2017*. KLKH. Jakarta.
- Khairuddin. 1992. *Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek: Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan*. Liberty. Yogyakarta.
- Khairullah, S. I., & Fatimah, E. 2016. Persepsi Masyarakat Terhadap Fungsi Hutan Mangrove Dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana di Gampong Lamteh Kabupaten Aceh Besar dan Gampong Pande Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Kebencanaan*, 3(3), 110–119.
- Kusuma, I. W. M. W., Raka, A. A. G., & Sumada, I. M. 2022. Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa, di Desa Cangg

- Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. *Jurnal Administasi Publik*, 7(1), 12–19.
- Listiana, I., Murniati, K., Mutolib, A., & Yanfika, H. 2021. Pelayanan & Manfaat Koperasi serta Pengaruhnya terhadap Partisipasi Anggota (Studi Kasus Pada Koperasi Jurai Siwo Ragem Kota Metro). *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 5(1), 168–179.
- Listiana, I., Rangga, K. R., Purnomojati, A., & Nanik, A. P. 2020. Respons Petani Terhadap Penggunaan Combine Harvester Pada Waktu Panen Padi Sawah Di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, 23(3), 259–269.
- Listiana, I., Sumardjo, D. S., & Tjiptopranoto, P. 2018. Hubungan Kapasitas Penyuluh dengan Kepuasan Petanidalam Kegiatan Penyuluhan. *Jurnal Penyuluhan*, 14(2).
- Luntungan, W.G.A., & Tawas. H.N. 2019. Strategi Pemasaran Bambuden Boulevard Manado: Analisis Swot. *Jurnal Emba*, 7(4), 5495-5504.
- Manurung, R. C. 2010. *Peran Serta Masyarakat Terhadap Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove di Desa Bagan Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Margono. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Melana, D. M., & Courtney, C. A. 2000. Mangrove Management and Development in Philipines. *Presented during the meeting on Mangrove and aquaculture Management held at Kasetsart Univ. Campus*, Bangkok.
- Mubyarto. 1998. Pengantar Ekonomi Pertanian. In *Edisi III*. LP3ES. Jakarta.
- Mulyadi, M. 2009. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Nadi Pustaka. Ciputat.
- Musoleha, T., Hasanuddin, T., & Listiana, I. 2014. . Persepsi Masyarakat Terhadap Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) PTPN VIII Unit Usaha Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *JIIA*, 2(4), 390–398.
- Nanlohy, H., Bambang, A. N., Ambaryanto, & Hutabarat. 2014. Persepsi Masyarakat Terhadap Kawasan Mangrove Teluk Kotania. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 2(1), 89–98.
- Narti, S. 2015. Hubungan Karakteristik Petani dengan efektivitas Komunikasi Penyuluhan pertanian dalam Program SI-Ptt (Kasus Kelompok Tani di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara). *Jurnal Professional Fis Unived*, 2(2), 42–45.
- Ndraha, T. 1987. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Bina Aksara. Jakarta.

- Nikijuluw, V. P. H. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*. Pustaka Cidesindo. Jakarta.
- Notoatmodjo, S. 2011. *Ilmu dan Seni Kesehatan Masyarakat*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Notoadmojo, S. 2018. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nurmayasari, I., Viantimala, B., Gultom, D. T., Yanfika, H., & Mutolib, A. 2020. Partisipasi Dan Kepuasan Petani Terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian Di Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 6(1), 448–459.
- Podungge, D., Bempah, I., & Boekoesoe, Y. 2020. Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Mangrove (Studi Kasus Hutan Mangrove Desa Langge Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara). *Agrinesia*, 5(1), 9–15.
- Pontoh, O. 2011. Peranan Nelayan Terhadap Rehabilitasi Ekosistem Hutan Bakau (Mangrove). *Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis*, 7(2), 73–79.
- Praja, A. N. 2009. Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Civil Society. *Tesis*, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Priyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo. Zifatama Publishing.
- Pusat Penyuluhan Pertanian. 2012. Materi Penyuluhan Pertanian: Penguatan Kelembagaan Petani. In *Buku III Kelompok Tani Sebagai Unit Produksi*. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Putra, P. G. K., & Suryawan, I. B. 2018. Partisipasi Masyarakat Desa Jungutbatu Di Daya Tarik Wisata mangrove Tour, Nusa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 6(1), 129–133.
- Putriana, R., Tenriawari, A. N., & Amrullah, A. 2018. Pengaruh Faktor-Faktor Partisipasi Terhadap Tingkat Partisipasi Petani Anggota P3a Dalam Kegiatan Pengelolaan Saluran Irigasi. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 14(3), 263–274.
- Qurniati R., Febryano I.G., and Zulfiani D. 2017. How Trust Influence Social Capital to Support Collective Action in Agroforestry Development. *Biodiversitas*. 18(3), 1201-1206.
- Ramadani, M. R., & Mayarni. 2021. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kepariwisataaan Kelurahan Agrowisata Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 214–226.
- Ramadhani, O., Hasanuddin, T., & Listiana, I. 2020. Partisipasi Anggota Kelompok Tani dalam Program Upsus Pajale di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *Suluh Pembangunan: Journal of Extension and Development*, 2(2), 76–83.

- Ramadoan, S. P., Mujiono, & Pulungan, I. 2016. Peran PKSM Dalam Meningkatkan Fungsi Kelompok Tani Dan Partisipasi Masyarakat Di Kabupaten Bima, NTB. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 10(2), 199–210.
- Rananda, A. 2021. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perintisan Kampung Wisata Edukasi Berbasis Ekologi (Studi Kampung Legokawi Desa Cukangjayaguna Kecamatan Sodong Hilir Kabupaten Tasikmalaya). *Tesis*, Universitas Siliwangi.
- Ronsumbre, V., & Ihsannudin, I. 2021. Persepsi Masyarakat Terhadap Kondisi Sumber Daya Alam Guna Mendukung Usaha Pertanian Berkelanjutan di Desa Duber, Kecamatan Supiori Timur, Kabupaten Supiori. *AGRISCIENCE*, 2(2).
- Rosyida, S. A., Sawitri, B., & Purnomo, D. 2021. Hubungan Karakteristik Petani dengan Tingkat Adopsi Inovasi Pembuatan Bokashi dari Limbah Ternak Sapi. *Jurnal Kirana*, 2(1), 54–64.
- Sajogyo, P. 1990. *Partisipasi LSM dan LPSM Dalam Pembangunan di Pedesaan Jawa Barat*. Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian IPB. Bogor.
- Saptana, Sunarsih, & Friyanto, S. 2013. *Prospek Model- Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL) dan Replikasi Pengembangan KRPL*. 1–22.
- Sastropoetra, S. R. A. 1988. *Partisipasi, Komunitas, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Alumni, Bandung.
- Satria, A. 2002. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Cidesindo. Jakarta.
- Septiarani, B., & Handayani, W. 2016. The Role Of Local Champion In Community - Based Adaptation In Semarang Coastal Area. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 12(3), 263–276.
- Setiawan, H., & Purwanti, R. 2017. Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Konservasi Ekosistem Mangrove di Pulau Tanakeke Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kelautan*, 14(1), 57–70.
- Siegel, S. 2005. *Statistika Nonparametrik untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Singarimbun, M., & Efendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*. PT. Pustaka LP3ES. Jakarta.
- Slamet, Y. 1994. *Pengembangan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Soedarisman, H. 2001. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS. *Makalah disampaikan pada acara pelatihan pengelolaan DAS rangka onotomi daerah*.
- Soekartawi. 1999. *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*. PT. Raja Grafindo Persada.

Jakarta.

- Soekartawi. 2003. *Teori Ekonomi Produksi dengan Pokok Bahasan Analisis Cobb-Douglas*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono, S. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. In *Edisi Baru*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soetomo. 2009. *Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyah. 2001. Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar (SD) Negeri IV Wates, Kabupaten Kulon Progo. *Tesis*, UNY.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. PT Alfabet.
- Suhatmansyah. 2009. *Pembinaan Organisasi Mitra Pemerintah*. Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik. Departemen Dalam Negeri.
- Sumaryadi, I. N. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Sumodiningrat, G. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Surayya, Q. 2020. Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Rehabilitasi Mangrove di Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 17(2) : 101-115.
- Susilo, M. 1992. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. BPFE UGM. Yogyakarta.
- Sutrisno, S. 2015. Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengembangan Tanaman Mangrove di Kabupaten Pati. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 7(1), 63–73.
- Syahyuti. 2007. Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Sebagai Kelembagaan Ekonomi di Pedesaan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 5(1).
- Tampubolon, A. 2017. *Mangrove memelihara bentang kehidupan, lahan, dan laut*. *Media Brief*. 5(1), 1–4.
- Tanjung, N. S., Sadono, D., & Widodo, C. T. 2017. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Nagari di Sumatera Barat. *Jurnal Penyuluhan*, 13(1), 3–14.
- Tilaar, H. A. R. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Menejemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Tjokrowinoto, M. 1996. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Pustaka belajar. Yogyakarta.
- Tuheteru, F., & Mahfudz. 2012. *Ekologi, Manfaat & Rehabilitasi, Hutan Pantai Indonesia*. Balai Penelitian Kehutanan Manado. Manado.

- Tulungen, J. J. 2002. *Panduan Pembentukan dan pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat*. Jakarta.
- Uceng, A., Ali, A., Mustanir, A., & Nirmawati. 2019. Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cempa Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 1–17.
- Undang-Undang Nasional Republik Indonesia Pasal 28 C Ayat 2. 1945. *Tentang kebebasan berserikat dan berkumpul*. DPR RINo Title.
- Undang-Undang Nasional Republik Indonesia Pasal 28 E Ayat 3. 1945. *Tentang kebebasan berserikat dan berkumpul*.
- Undang-Undang RI No. 20. 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Viantimala, B., Yanfika, H., Mutolib, A., Listiana, I., & Effendi, I. 2020. Kinerja Penyuluh dan Partisipasi Petani Dalam Kegiatan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. *Journal of Food System and Agribusiness*, 4(1), 9–16.
- Wardoyo, S. T. H. 1992. *Panduan Metodologi Pengkajian Kualitas Air. Laboratorium Lingkungan Budidaya Perairan*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Wibowo, A. 2016. *Kajian tentang Perilaku Pengguna Sistem Informasi dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM)*. Universitas Budi Luhur. Jakarta.
- Widiyastuti, Widiyanti, E., & Sutanto. 2019. Persepsi Petani Terhadap Program Pengembangan SRI di Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang. *Agrist*, 4(3), 476–485.
- Widyawati, R. F., & Pujiono, A. 2013. Pengaruh Umur, Jumlah Tanggungan Keluarga, Jarak Tempat Tinggal dan Keuntungan Terhadap Curahan Waktu Kerja Wanita Tani Sektor Pertanian di Desa Tajuk Kecamatan Gatesan Kabupaten Semarang. *Diponegoro Journal of Economics*, 2(3).
- Yuliani, S., & Herminasari, N. S. 2017. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi. *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, 6(2), 42–53.
- Yuliasamaya, D. A., & Hilmanto, R. 2014. Perubahan Tutupan Hutan Mangrove di Pesisir Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Sylva Lestari*, 2(3), 111–124.